PERADI
PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ALLIANCE

SUARA ADVOKAT INDONESIA

Jakarta, 06 Mei 2026
Nomor: 070/PERADI-SAI/DPN/V/2026
Lampiran: 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Peserta Rapat Kerja Nasional 2026
PERADI SAI
di Tempat

Perihal: Penyampaian Laporan Perkembangan Organisasi dan Pelaksanaan Program Kerja DPN PERADI SAI Periode Agustus 2025 – April 2026

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Rapat Kerja Nasional ("**Rakernas**") Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia ("**PERADI SAI**") Tahun 2026, bersama ini kami menyampaikan **Laporan Perkembangan Organisasi PERADI dan Pelaksanaan Program Kerja DPN PERADI SAI Periode Agustus 2025 – April 2026** sebagai bahan pembahasan, evaluasi, dan pertimbangan dalam agenda Rakernas.

Laporan ini memuat perkembangan organisasi selama masa kepengurusan berjalan, meliputi aspek kelembagaan, program kerja, sertifikasi advokat, penguatan organisasi di daerah, hubungan kelembagaan, serta berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wadah profesi Advokat.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi dasar yang konstruktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan pada Rakernas 2026 guna memperkuat soliditas, profesionalisme, dan masa depan organisasi PERADI SAI.

Demikian surat pengantar ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh peserta Rakernas, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Perkumpulan Advokat Indonesia
PERADI SAI
Suara Advokat Indonesia

Harry Ponto, S.H., LL.M.
Ketua Umum

Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.
Sekretaris Jenderal

Golden Centrum, Jl. Majapahit No. 26 Blok H, Jakarta Pusat 10160, Indonesia
T. +62 21 386 1464 E. info@peradi-sai.com
www.peradi-sai.com

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN
PERKEMBANGAN ORGANISASI DAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DPN PERADI SAI

Periode Agustus 2025 – April 2026

Dari stabilisasi dan konsolidasi menuju akselerasi kualitas, organisasi, dan layanan anggota

disampaikan dalam

RAPAT KERJA NASIONAL PERADI SAI

JAKARTA, 8 - 10 MEI 2026

PERADI
PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ALLIANCE
SUARA ADVOKAT INDONESIA

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ("**UU Advokat**") mengamanatkan kepada organisasi advokat, sebagai wadah profesi Advokat, untuk senantiasa meningkatkan kualitas profesi Advokat. Untuk itu UU Advokat memberikan berbagai kewenangan yang besar kepada organisasi advokat terkait dengan profesi Advokat, mulai dari rekrutmen Advokat, pengawasan terhadap Advokat, hingga penindakan terhadap Advokat yang terbukti melanggar kode etik profesi Advokat.

Merujuk pada Akta Pendiriannya, Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia ("**PERADI SAI**"), sebagai *implementing agency* (lembaga pelaksana) dari UU Advokat didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat sebagaimana diamanatkan UU Advokat melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan yang bertujuan mendukung Advokat dalam menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk memberdayakan masyarakat agar memahami dan menegakkan hak-hak fundamentalnya di hadapan hukum dalam rangka penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu juga melalui penyelenggaraan kegiatan yang bertujuan mendukung Advokat dalam pelaksanaan profesi di bidang konsultasi, negosiasi, dan pembuatan kontrak dagang, guna memberdayakan masyarakat serta mendorong pembaruan hukum nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya maksud dan tujuan tersebut di atas dan melaksanakan amanat Musyawarah Nasional ("**Munas**") PERADI SAI 2025 yang dipercayakan kepadanya, Harry Ponto, sebagai Ketua Umum terpilih PERADI SAI untuk periode 2025 – 2030, bersama dengan Dewan Pimpinan Nasional ("**DPN**") PERADI SAI yang dibentuknya telah mengambil berbagai langkah/kebijakan strategis dan juga melaksanakan berbagai program kerja, beberapa hal diantaranya melakukan perubahan dan pendaftaran Anggaran Dasar ("**AD**") PERADI SAI guna mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum Republik Indonesia; melaksanakan sertifikasi profesi Advokat yang meliputi kegiatan Pendidikan Khusus

Profesi Advokat ("**PKPA**"), ujian profesi Advokat ("**UPA**"), magang, pengangkatan dan pengambilan sumpah calon Advokat; melaksanakan kegiatan pendidikan hukum berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas para Advokat yang menjadi anggota PERADI SAI. Di bidang organisasi, DPN PERADI SAI secara aktif mendorong pembentukan berbagai cabang PERADI SAI di berbagai provinsi di Indonesia. Kemudian, dalam rangka mengembangkan jaringan kerja dengan profesi Advokat di luar negeri, DPN PERADI SAI juga aktif berpartisipasi dalam forum-forum internasional profesi Advokat yang dilaksanakan di manca negara.

Lebih lanjut mengenai berbagai perkembangan organisasi, langkah/kebijakan strategis dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh DPN PERADI dalam kurun waktu Agustus 2025 sampai dengan April 2026 akan dijelaskan lebih detil pada bagian-bagian berikut.

II. LEGALITAS PERADI SAI

Permasalahan terkait keabsahan kepengurusan PERADI bermula saat terjadinya perpecahan pada pelaksanaan Munas 2025 PERADI di Makassar pada 26-28 Maret 2015, yang kemudian memunculkan 3 (tiga) versi kepengurusan PERADI yaitu PERADI kepengurusan Juniver Girsang, PERADI kepengurusan Fauzie Yusuf Hasibuan (Otto Hasibuan), dan PERADI kepengurusan Luhut M.P. Pangaribuan.

Tak lama, PERADI kepengurusan Luhut M.P. Pangaribuan mengajukan permohonan persetujuan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") atas perubahan Anggaran Dasar PERADI, terkait perubahan kegiatan perkumpulan dan perubahan alamat kedudukan PERADI serta perubahan susunan kepengurusan PERADI. Menkumham kemudian mengeluarkan surat keputusan yang menyetujui permohonan tersebut, yaitu (i) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tertanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan (ii) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883 Tahun 2022 tertanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia. Keluarnya persetujuan Menkumham itu memicu reaksi dari PERADI kepengurusan yang lain karena keluarnya persetujuan Menkumham tersebut dapat diartikan bahwa kepengurusan PERADI yang sah dan diakui oleh pemerintah adalah PERADI kepengurusan Luhut M.P Pangaribuan.

Pada tanggal 20 Juli 2022, PERADI kepengurusan Fauzie Yusuf Hasibuan (Otto Hasibuan) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ("**PTUN Jakarta**") terhadap Menkumham atas keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Menkumham yang memberikan persetujuan atas kepengurusan PERADI yang dipimpin oleh Luhut M.P. Pangaribuan, yang didaftarkan di kepaniteraan PTUN Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022 dengan nomor Register Perkara 252/G/2022/PTUN.JKT.

Atas gugatan PTUN yang diajukan terhadap Menkumham tersebut, PERADI kepengurusan Juniver Girsang (kemudian dikenal dengan nama PERADI Suara

Advokat Indonesia), juga masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara tersebut. Sedangkan PERADI kepengurusan Luhut M.P. Pangaribuan, yang notabene telah mendapat pengesahan dari Menkumham, masuk sebagai Tergugat II Intervensi.

Berikut adalah Putusan PTUN Jakarta No. 251/G/2022/PTUN.JKT atas perkara *a quo*:

"*MENGADILI:*

Dalam Penundaan:
Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 9 Maret 2023 tetap sah dan berlaku;

Dalam Eksepsi:
Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk sebagian;*

2. *Menyatakan batal Surat Keputusan TERGUGAT:*

    1) *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan*

    2) *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;*

3. *Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TERGUGAT:*

1) *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan*

2) *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;*

4. *Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;*

5. *Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).”*

Atas putusan PTUN Jakarta tersebut diajukanbanding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (“**PT TUN Jakarta**”). Berikut adalah Putusan Banding PT TUN Jakarta Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT tanggal 11 September 2023 atas permohonan banding yang diajukan terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 251/G/2022/PTUN.JKT:

“***MENGADILI:***

1. *Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi, Pembanding II/Terbanding II/Tergugat, dan Pembanding III/Terbanding III/Penggugat;*

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor *251/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 9 Maret 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar sebagai berikut:*

Dalam Penundaan

Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 9 Maret 2023 tetap sah dan berlaku;

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Pembanding II/Terbanding II/Tergugat, Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Pembanding III/Terbanding III/Penggugat untuk seluruhnya;*

2. *Mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat Intervensi untuk sebagian;*

3. *Menyatakan batal Surat Keputusan Pembanding II/Terbanding II/Tergugat:*

    1) *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan*

    2) *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;*

4. *Mewajibkan kepada Pembanding II/Terbanding II/Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan:*
    1) *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan*

Perhimpunan Advokat Indonesia; dan

2) *Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;*

5. *Memerintahkan kepada Pembanding II/Terbanding II/Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Marion Silitonga, S.H. melalui surat Nomor 25/NOT/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015;*

6. *Memerintahkan kepada Pembanding II/Terbanding II/Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 serta No. 147/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah*

diajukan oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham pada tanggal 28 April 2022;

7. *Menghukum Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Terbanding II/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”*

Atas Putusan Banding PT TUN Jakarta tersebut diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berikut adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024 tanggal 29 Oktober 2024 atas permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan PT TUN Jakarta No. 199/B/2023/PT.TUN.JKT:

“***MENGADILI:***

1. *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II* ***DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI)*** *dan Pemohon Kasasi III* ***Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia****;*

2. *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I* ***DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA****;*

3. *Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 9 Maret 2023;*

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan:

- *Mencabut Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT,*

tanggal 9 Maret 2023;

Dalam Pokok Perkara:

1. *Menolak gugatan dari Penggugat* ***PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)*** *dan Penggugat Intervensi* ***DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA****;*

2. *Menghukum Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);*"

Mencermati putusan pengadilan cq. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 189 K/TUN/2024 tanggal 29 Oktober 2024, segenap anggota dan pengurus PERADI SAI menyadari bahwa penting bagi PERADI SAI untuk mencari jalan keluar untuk melindungi kepentingan hukum PERADI SAI, terutama terkait eksistensi PERADI SAI sebagai organisasi advokat yang menjalankan kewenangan UU Advokat. Oleh karenanya, pada Munas PERADI SAI yang dilaksanakan di Bali pada 25-26 Juli 2025 ("**Munas PERADI SAI 2025**"), Ketua Umum DPN terpilih, Harry Ponto, diberikan amanat untuk mengurus status badan hukum PERADI SAI demi terciptanya kepastian hukum terkait keanggotaan PERADI SAI, aset-aset PERADI SAI, serta hal-hal terkait lainnya. Dalam keputusannya nomor 06/Munas/PERADI-SAI/2025 tanggal 26 Juli 2025 tentang Pengesahan Hasil Sidang Komisi-Komisi Dalam Musyawarah Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia 2025, Munas PERADI SAI 2025 memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPN PERADI SAI masa bakti 2025-2030 untuk melakukan perubahan yang diperlukan pada Anggaran Dasar untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia.

Menindaklanjuti mandat yang diberikan kepadanya oleh Munas PERADI SAI 2025, Ketua Umum DPN PERADI melakukan sejumlah tahapan, yakni melakukan diskusi konsultatif dengan para senior Advokat yang membidani dan bersama-sama membesarkan organisasi, melakukan rapat-rapat dalam kepengurusan DPN PERADI SAI, dengan basis analisis mendalam menggunakan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*).

Selanjutnya, Ketua Umum DPN PERADI bersama jajaran kepengurusan DPN PERADI SAI masa bakti 2025 – 2030 yang dibentuknya sepakat untuk melakukan perubahan menyeluruh atas Anggaran Dasar PERADI SAI, termasuk perubahan nama yang diperlukan, dengan mendirikan organisasi advokat yang diberi nama **PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA** yang disingkat PERADI SAI, yang tetap berkesinambungan dengan segala ketentuan (termasuk Anggaran Dasar) dan keputusan yang telah ditetapkan/diputuskan dalam **PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA** (PERADI SAI) sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia nomor KEP.008/PERADI-SAI/KETUM/2025 tertanggal 15 September 2025 tentang Pendirian dan Anggaran Dasar Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI), yang dinyatakan kembali ke dalam Akta Notaris Desmayani Setianingsih, S.H., M.Kn. nomor 04 Tanggal 17 September 2025, yang menjadi dasar berdirinya dan sekaligus transformasi Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) menjadi **Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI)**.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor AHU-0006913.AH.01.07.Tahun 2025 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia tertanggal 24 September 2025, Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) telah resmi bertranformasi menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) dan memperoleh statusnya sebagai badan hukum perkumpulan.

Dengan demikian, amanat Munas PERADI SAI 2025 yang memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPN terpilih masa bakti 2025 – 2030 untuk mendapatkan pengesahan/persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia atas status badan hukum PERADI SAI telah berhasil dilaksanakan dan terpenuhi.

Sehubungan perubahan nama menjadi **Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI)**, DPN telah melakukan sosialisasi kepada DPC-DPC dalam rangka menjelaskan bahwa perubahan nama tersebut tidak membawa konsekuensi

terhadap keabsahan ijin praktek Advokat anggota PERADI SAI mengingat lembaganya tetap sama dengan yang dahulu. Penyesuaian terkait perubahan nama tersebut juga akan dilakukan hal-hal lainnya, misalnya Kartu Tanda Pengenal Advokat serta berbagai atribut administrasi kesekretariatan (kop surat, amplop, dan lain-lain).

III. KEPENGURUSAN PERADI SAI

Dalam rangka menjalankan roda organisasi PERADI SAI guna mewujudkan maksud dan tujuan pendirian PERADI SAI serta mewujudkan amanat Munas PERADI SAI 2025 yang diberikan kepadanya, Ketua Umum PERADI SAI terpilih untuk periode 2025 - 2030, melalui Keputusan Ketua Umum DPN PERADI SAI Nomor: KEP. 002/PERADI-DPN/KETUM/2025 tertanggal 26 Agustus 2025 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan DPN PERADI SAI No. KEP.024/PERADI-SAI/DPN/2026 tertanggal 6 Mei 2026, telah membentuk kepengurusan DPN PERADI SAI masa bakti 2025 – 2030.

DPN PERADI SAI periode 2025 – 2030 terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, beberapa komite yang diketuai oleh seorang advokat dan didampingi oleh beberapa orang wakilnya, serta Koordinator-koordinator Daerah.

Perlu disampaikan juga bahwa pembentukan beberapa komite dalam kepengurusan DPN PERADI SAI saat ini merupakan cerminan dari program kerja yang menjadi fokus utama kepengurusan DPN PERADI SAI periode 2025 – 2030, mulai dari program kerja dalam rangka meningkatkan kualitas rekrutmen profesi Advokat, meningkatkan kualitas para pengemban profesi Advokat, memberikan perlindungan terhadap Advokat dan profesi Advokat, pengawasan dan penindakan terhadap Advokat yang melanggar kode etik profesi Advokat, meningkatkan jaringan kerja/kemitraan dengan institusi lain, meningkatkan jaringan kerja dengan profesi Advokat/organisasi profesi Advokat di negara lain, meningkatkan kapasitas organisasi, hingga program kerja dalam rangka pengembangan sistem digitalisasi terkait manajemen organisasi agar dapat mendukung kelancaran berjalannya roda organisasi PERADI SAI .

Pada periode kepemimpinannya saat ini, Ketua Umum, Harry Ponto, juga membentuk Dewan Pembina yang memiliki berperan melakukan pembinaan dan pengawasan atas jalannya organisasi PERADI SAI agar tetap sesuai dengan AD dan Peraturan Rumah Tangga ("**PRT**") PERADI SAI yang ditetapkan.

Selain itu, juga dibentuk Dewan Penasihat yang berperan memberikan nasihat dan

pertimbangan non mengikat kepada DPN PERADI SAI, baik nasihat atau pertimbangan yang terkait dengan isu-isu di bidang hukum, organisasi, maupun kebijakan publik.

Susunan lengkap kepengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan DPN PERADI SAI periode masa bakti 2025 – 2030 terlampir dalam Lampiran 1 Laporan ini.

IV. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PENDIDIKAN KHUSUS PROFESI ADVOKAT

Pelaksanaan program kerja di bidang PKPA ini ditangani oleh Komite Pendidikan Profesi Advokat yang merupakan bagian dari DPN PERADI SAI.

Selama periode Agustus 2025 sampai April 2026, DPN PERADI SAI telah melaksanakan **19** PKPA dengan total peserta sebanyak **649** orang, yang terbagi sebagai berikut:

- 16 PKPA dilaksanakan oleh DPN PERADI SAI bekerja sama dengan 14 Dewan Pimpinan Cabang ("**DPC**") PERADI SAI dan 15 institusi pendidikan;

- 1 PKPA dilaksanakan oleh DPN PERADI PERADI SAI langsung dengan institusi pendidikan (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada);

- 1 PKPA dilaksanakan oleh DPN PERADI SAI bekerja sama dengan instansi pemerintah (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia) dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta;

- 1 PKPA dilaksanakan oleh DPN PERADI SAI bekerja sama dengan Kantor Advokat AMLAW dan Fakultas Hukum Universitas Satyagama.

Keseluruhan PKPA tersebut dilaksanakan baik dengan metode tatap muka (*offline*), daring (*online*), maupun hybrid (kombinasi tatap muka dan daring).

Berikut adalah detail pelaksanaan program kerja di bidang PKPA

No	Nama Penyelenggara	Mitra Universitas	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	DPC Malang Raya	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	08/08/2025 - 23/08/2025	41
2	DPN PERADI SAI	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	19/08/2025 - 30/08/2025	64

No	Nama Penyelenggara	Mitra Universitas	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
3	DPC Tangerang Raya	Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh Yusuf	30/08/2025 - 07/09/2025	26
4	DPC Jakarta Utara	Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	13/09/2025 - 28/09/2025	36
5	DPC Jakarta Selatan	Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan	29/09/2025 - 04/10/2025	30
6	DPC Malang Raya	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	23/10/2025 - 02/11/2025	21
7	Kantor Advokat AMLAW	Fakultas Hukum Universitas Satyagama	25/10/2025 - 09/11/2025	31
8	DPC Kendari	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	25/10/2025 - 16/11/2025	21
9	DPC Ambon	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	17/11/2025 - 26/11/2025	25
10	DPN dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta	22/11/2025 - 13/12/2025	15
11	DPC Mataram	Fakultas Hukum Universitas Mataram	28/11/2025 - 13/12/2025	19
12	DPC Bengkulu	Fakultas Hukum Universitas Dehasen	10/01/2026 - 25/01/2026	22
13	DPC Padang	Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti	10/01/2025 - 25/01/2026	50
14	DPC Malang Raya	Fakultas Hukum Universitas Muuhammadiyah Malang	07/02/2026 - 07/03/2026	53
15	DPC Sidoarjo Raya	Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya	28/02/2026 - 08/03/2026	17

No	Nama Penyelenggara	Mitra Universitas	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
16	DPC Samarinda	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	11/04/2026 - 18/04/2026	81
17	DPC Semarang	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	11/04/2026 - 26/04/2026	36
18	DPC Jakarta Selatan & DPC Jakarta Timur	Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan & Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta	27/04/2026 - 02/05/2026	34
19	DPC Denpasar	Fakultas Hukum Universitas Udayana	17/04/2026 - 15/05/2026	27
JUMLAH PESERTA				**649**

Keterangan	
DPC dengan frekuensi penyelenggaraan paling banyak	DPC PERADI SAI Malang Raya (3 kali)
DPC dengan jumlah peserta terbanyak	DPC PERADI SAI Malang Raya (115)

V. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG SERTIFIKASI PROFESI (UJIAN PROFESI ADVOKAT DAN MAGANG)

Selama periode 2025-2026, Komite Sertifikasi Profesi sebagai komite di DPN PERADI SAI yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja terkait UPA dan magang telah menyelenggarakan 17 kali UPA dengan jumlah peserta terdaftar sebanyak 596 calon Advokat, dimana 580 peserta dinyatakan lulus.

Berikut adalah detail kegiatan pelaksanaan Ujian Profesi Advokat

NO	TGL	LOKASI UJIAN	JUMLAH PESERTA				
			DAFTAR	TIDAK HADIR / MUNDUR	HADIR	LULUS	TIDAK LULUS
1	15 Nov 2025	Ambon (Gel. I) • Kampus PGSD Universitas Pattimura, Kota Ambon – Maluku	9	0	9	9	0
2	31 Jan 2026	Batam (Gel. I) • Sahid Batam Center Hotel & Conventio, Batam - Kepulauan Riau	15	0	15	15	0
3	15 Nov 2025	Denpasar (Gel. I) • Quest Hotel San Denpasar, Bali	37	0	37	37	0

NO	TGL	LOKASI UJIAN	JUMLAH PESERTA				
			DAFTAR	TIDAK HADIR / MUNDUR	HADIR	LULUS	TIDAK LULUS
4	6 Des 2025	Yogyakarta • Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta	24	0	24	24	0
5	25 Okt 2025	Jakarta Utara (Gel. III) • ibis Styles Jakarta, Sunter – Jakarta Utara	41	0	41	41	0
6	25 Okt 2025	Jakarta Selatan (Gel. II) • Universitas Pelita Harapan, Karawaci - Banten	61	2	59	59	0
7	6 Des 2025	Jakarta Barat (Gel. I) • Jakarta Design Center (JDC), Jakarta Pusat	35	2	33	33	0
8	31 Jan 2026	Kendari (Gel. I) • Swiss-Belhotel, Kendari - Sulawesi Tenggara	22	0	22	22	0
9	5 Juli 2025	Lombok Timur Raya (Gel. I) • Lombok Garden Hotel, Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat	20	1	19	19	0

NO	TGL	LOKASI UJIAN	JUMLAH PESERTA				
			DAFTAR	TIDAK HADIR / MUNDUR	HADIR	LULUS	TIDAK LULUS
10	20 Sept 2025	Makassar (Gel. I) • Swiss-Bel Inn Panakkukang Makassar, Kota Makassar - Sulawesi Selatan	17	0	17	17	0
11	1 Nov 2025	Malang Raya (Gel. I) • Savana Hotel & Convention, Kota Malang - Jawa Timur	58	1	57	57	0
12	24 Jan 2026	Medan (Gel. I) • Universitas Pelita Harapan, Kota Medan - Sumatera Utara	41	1	40	40	0
13	5 Juli 2025	Pekanbaru (Gel. I) • Grand Central Hotel, Kota Pekanbaru – Riau	26	0	26	24	2
14	23 Agustus 2025**	Padang (Gel. I) • Hotel Truntum Padang, Kota Padang – Sumatera Barat	59	1	58	56	2
15	28 Juni 2025	Surabaya Raya (Gel. I) • Kampi Hotel Tunjungan Surabaya, Surabaya – Jawa Timur	30	0	30	30	0

NO	TGL	LOKASI UJIAN	JUMLAH PESERTA				
			DAFTAR	TIDAK HADIR / MUNDUR	HADIR	LULUS	TIDAK LULUS
16	23 Agustus 2025	Samarinda (Gel. I) ● Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Kota Samarinda – Kalimantan Timur	71	1	70	68	2
17	1 November 2025	Tangerang Raya (Gel. I) ● Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang – Banten	30	1	29	29	0
		TOTAL	**596**	**10**	**586**	**580**	**6**

VI. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG MAGANG DAN PENGANGKATAN ADVOKAT

Dalam periode Agustus 2025 sampai dengan April 2026, Komite Magang dan Pengangkatan ("**KOMPA**"), telah menyelenggarakan beberapa kegiatan dalam rangka melaksanakan program kerja DPN PERADI di bidang magang dan pengangkatan advokat. Beberapa kegiatan tersebut, yaitu:

a. Penerbitan Kartu Advokat Magang

Sepanjang periode Agustus 2025 – April 2026, **DPN PERADI SAI telah menerbitkan 467 Kartu Advokat Magang untuk para peserta UPA yang telah dinyatakan lulus**. Sebagaimana diatur dalam UU Advokat, seseorang yang ingin menjadi Advokat harus terlebih dahulu selesai menjalani 2 tahun magang di kantor Advokat. Kartu Advokat Magang ini diteribitkan oleh DPN PERADI SAI dalam rangka mengakomodir kebutuhan para Advokat Magang agar dalam masa magang tersebut para Advokat Magang dapat ikut mendampingi para Advokat senior yang menjadi mentor mereka ketika memberikan jasa hukum kepada masyarakat, khususnya untuk ikut dalam persidangan. Dengan demikian diharapkan dalam masa magang tersebut, para Advokat Magang akan memiliki pengalaman praktek yang akan mereka butuhkan kelak ketika mereka telah menjadi Advokat. Di sisi lain, penerbitan Kartu Advokat Magang ini juga bertujuan untuk menjaga agar para Advokat Magang tersebut tetap mengikuti proses pengangkatan Advokat dan pengambilan sumpah Advokat melalui PERADI SAI dalam rangka menggalang para calon Advokat agar kelak menjadi anggota PERADI SAI.

Berikut adalah data penerbitan Kartu Advokat Magang yang diterbitkan oleh DPN PERADI dalam kurun waktu sampai dengan April 2026.

NO	NAMA KOTA	PENGAJUAN		JUMLAH PESERTA
		TAHAP	TAHUN	
1	DPC Lombok Timur Raya	VI	2025	14
2	DPC Jakarta Utara			3
3	DPC Surabaya Raya			11

NO	NAMA KOTA	PENGAJUAN		JUMLAH PESERTA
		TAHAP	TAHUN	
4	DPC Pekanbaru			24
5	DPC Surabaya Raya	VII	2025	27
6	DPC Samarinda			68
7	DPC Padang			56
8	DPC Surabaya Raya	VIII	2025	2
9	DPC Jakarta Utara			1
10	DPC Jakarta Selatan	IX	2025	59
11	DPC Jakarta Utara			10
12	DPC Tangerang Raya	X	2025	29
13	DPC Malang Raya	XI	2025	57
14	DPC Jakarta Utara			10
15	DPC Denpasar	XII	2025	37
16	Universitas Gajah Mada	XIII	2025	24
17	DPC Jakarta Barat			35
Total				**467**

b. Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Advokat

Dalam kurun waktu Agustus 2025 – April 2026, DPN PERADI SAI telah selesai menyelenggarakan beberapa kegiatan **pengangkatan dan pengambilan sumpah di beberapa daerah terhadap 507 calon Advokat**.

Sesuai dengan Surat Edaran No. 03/PERADI-DPN/SENII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, calon Advokat yang dapat mengikuti pengangkatan dan pengambilan sumpah di PERADI SAI hanya yang berasal dari organisasi: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

DPC yang dapat menyelenggarakan pengangkatan dan pengambilan sumpah Advokat adalah DPC yang telah terlebih dahulu mengadakan PKPA dan UPA. Karenanya, DPN PERADI cq. KOMPA tidak akan memproses permintaan pengangkatan dan pengambilan sumpah dari DPC yang TIDAK menyelenggarakan PKPA dan UPA terlebih dahulu.

Berikut adalah detail kegiatan pengambilan sumpah calon Advokat yang telah dilaksanakan oleh KOMPA dalam periode Agustus 2025 sampai dengan April 2026.

Tanggal	Tempat Pelaksanaan	DPC Pelaksana	Jumlah Peserta
3 Oktober 2025	Pengadilan Tinggi Denpasar	DPC Denpasar	64
21 Oktober 2025	Pengadilan Tinggi Surabaya	DPC Surabaya	40
30 Oktober 2025	Pengadilan Tinggi Medan	DPC Medan	30
10 Desember 2025	Pengadilan Tinggi Balikpapan	DPC Samarinda	65
18 Desember 2025	Pengadilan Tinggi Bandung	DPC Sumedang Raya	8
		DPC Karawang	9
07 Januari 2026	Pengadilan Tinggi Padang	DPC Padang	59
21 Januari 2026	Pengadilan Tinggi Riau	DPC Pekanbaru	24
21 Januari 2026	Pengadilan Tinggi Jakarta	DPC Jakarta Selatan	41
		DPC Jakarta Utara	32
26 Februari 2026	Pengadilan Tinggi Surabaya	DPC Malang Raya	47
26 Februari 2026	Pengadilan Tinggi Surabaya	DPC Sidoarjo Raya	25
10 Maret 2026	Pengadilan Tinggi Banten	DPC Tangerang Raya	46
10 April 2026	Pengadilan Tinggi Ambon	DPC Ambon	11
16 April 2026	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	DPC Aceh	6
		TOTAL	**507**

VII. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG ORGANISASI DAN ANGGOTA

Program kerja bidang organisasi dan anggota merupakan salah satu program kerja prioritas dalam kepengurusan DPN PERADI SAI periode 2025 – 2030. Pelaksanaan program kerja ini diserahkan kepada Komite Organisasi dan Keanggotaan ("**KOMORTA**") yang merupakan bagian dari DPN PERADI SAI.

Program Kerja Bidang Organisasi dan Anggota

Untuk tahun pertama (2025-2026), DPN PERADI SAI memiliki beberapa program kerja di bidang organisasi dan anggota, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan DPC-DPC PERADI SAI dalam rangka mendapatkan informasi terkait kondisi terkini dari DPC-DPC tersebut. Diharapkan dari pendataan tersebut, maka akan diketahui informasi berikut:
   - DPC yang masa bakti pengurusnya masih berlaku;
   - DPC yang masa bakti pengurusnya telah berakhir dan belum melaksanakan Musyawarah Cabang dalam rangka memiliki Ketua DPC yang baru;
   - DPC persiapan/Gugus Tugas yang sudah terbentuk maupun hasil pemekaran.

2. Mengembangkan organisasi melalui pembentukan/pemekaran paling sedikit 5 DPC baru, Gugus Tugas baru, dan Koordinator Daerah ("**Korda**"), yaitu sebagai berikut:
   - Boolang Mangondow Raya di Sulawesi Utara;
   - Pasaman Raya di Sumatera Barat;
   - Solok Raya di Sumatera Barat;
   - Buktitinggi di Sumatera Barat;
   - Seram Raya di Maluku;
   - Bima Raya (meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat).

3. Melakukan konsolidasi dengan seluruh DPC, Gugus Tugas serta Koordinator Daerah dalam rangka memastikan roda organisasi di tingkat DPC dan Gugus Tugas terus berfungsi sebagaimana mestinya melalui kegiatan Musyawarah Cabang dan

pelantikan DPC-DPC.

4. Melakukan sosialisasi perubahan nomenklatur organisasi dari Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) menjadi Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) kepada DPC-DPC yang bernaung di bawah PERADI SAI.

5. Mengembangkan dan mengelola database anggota berbasis digital.

6. Menyusun petunjuk teknis operasional yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait program kerja DPN PERADI SAI di bidang organisasi dan anggota, yang akan menjadi pedoman bagi KOMORTA, dengan merujuk AD dan PRT PERADI SAI.

7. Menyusun dan merumuskan peraturan organisasi sebagai penjabaran/pelaksanaan teknis atas AD dan PRT PERADI SAI, dengan melibatkan juga komite-komite lain di DPN PERADI SAI dan unsur Kesekjenan.

Realisasi Program Kerja

Realisasi program kerja di bidang organisasi dan anggota pada periode kepengurusan DPN PERADI SAI periode 2025 – 2030 ini merupakan kelanjutan realisasi program dari pengurus DPN PERADI SAI periode sebelumnya, dimana hasilnya menunjukkan capaian yang menggembirakan.

1. Per laporan ini disusun, PERADI SAI telah memiliki:
   a. 6 Korda dengan masa bakti 2025 - 2030, yaitu:
      - Korda Jawa Timur;
      - Korda Kalimantan (mencakup Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimanatan Selatan, dan Kalimantan Utara);
      - Korda Riau dan Kepulauan Riau;
      - Korda Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur;
      - Korda Jawa Barat
      - Korda Maluku dan Maluku Utara;

b. 55 DPC; dan
c. 1 (satu) Dewan Pimpinan Daerah ("**DPD**"), yaitu DPD Kalimantan Timur.

Selain itu, PERADI SAI juga telah membentuk 8 Gugus Tugas dalam rangka persiapan menuju pembentukan DPC di daerah Gugus Tugas yang bersangkutan.

Berikut adalah daftar 55 DPC dan 8 Gugus Tugas PERADI SAI di seluruh Indonesia:

DAFTAR DPC PERADI SAI DI SELURUH INDONESIA

No.	Nama DPC	Masa Bakti Kepengurusan	Keterangan
1	DPC Aceh	Berakhir per tanggal 15 Mei 2026	Aktif
2	DPC Ambon	Berakhir per tanggal 21 Maret 2026	Aktif
3	DPC Balikpapan	28 April 2025 – 28 April 2029	Aktif
4	DPC Bandung	04 Juli 2023 – 04 Juli 2026	Aktif
5	DPC Banyuwangi Raya	13 Mei 2022 – 13 Mei 2026	Aktif
6	DPC Batam	29 Maret 2022 – 29 Maret 2026	Pengurus lama DPC Batam mengajukan permohonan penundaan Musyawarah Cabang ("**Muscab**"). Mereka meminta agar Muscab dapat dilaksanakan paling lambat 3 bulan dari tanggal berakhirnya SK DPC (29 Maret 2026)
7	DPC Bekasi Raya	21 Juli 2025 – 21 Juli	• Aktif

No.	Nama DPC	Masa Bakti Kepengurusan	Keterangan
		2029	• Belum pelantikan
8	DPC Bengkulu	Berakhir 31 Januari 2026	• Aktif • Belum pelantikan
9	DPC Bogor Raya	23 Juni 2025 – 23 Juni 2029	• Aktif • Belum Pelantikan
10	DPC Bandar Lampung	17 Maret 2025 – 17 Maret 2029	• Aktif • Kepengurusan dilantik pada tanggal 1 Mei 2026
11	DPC Cianjur	Berakhir pada 15 November 2025	• Aktif • Menunggu laporan Muscab
12	DPC Deli Serdang	17 Juni 2025 – 17 Juni 2029	• Aktif • Belum pelantikan
13	DPC Denpasar	18 Juli 2022 – 18 Juli 2026	Aktif
14	DPC Gorontalo	27 Oktober 2025 – 27 Oktober 2029	Aktif
15	DPC Gresik Raya	28 Oktober 2022 – 28 Oktober 2026	Aktif
16	DPC Halmahera Utara	18 Juli 2025 – 18 Juli 2029	• Aktif • Belum pelantikan
17	DPC Indragiri Raya	4 Maret 2026 – 4 Maret 2030	• Aktif • Belum pelantikan
18	DPC Jakarta Barat	07 November 2025 – 07 November 2029	• Aktif • Belum pelantikan
19	DPC Jakarta Pusat	13 Mei 2022 – 13 Mei 2026	Aktif
20	DPC Jakarta Selatan	20 September 2022 – 20 September 2026	Aktif
21	DPC Jakarta Timur	21 Januari 2025 – 21 Januari 2029	Aktif

No.	Nama DPC	Masa Bakti Kepengurusan	Keterangan
22	DPC Jakarta Utara	15 April 2026 – 15 April 2030	• Aktif
23	DPC Kota Jambi	20 Oktober 2022 – 20 Oktober 2026	Aktif
24	DPC Kota Jayapura	11 Juli 2023 – 11 Juli 2027	Aktif
25	DPC Kampar	14 September 2021 – 14 September 2025	• Aktif • Belum muscab, dan sudah *follow up* untuk dibuatkan surat permohonan perpanjangan SK kepengurusan (09 April 2026)
26	DPC Karawang	12 Desember 2023 – 12 Desember 2027	Aktif
27	DPC Kediri Raya	08 Februari 2022 – 08 Februari 2026	• Aktif • Belum Muscab, dan sudah *follow up* untuk dibuatkan surat permohonan perpanjangan SK kepengurusan (09 April 2026)
28	DPC Kendari	21 Juni 2022 – 21 Juni 2026	Aktif
29	DPC Kutai Barat	21 April 2024 – 21 April 2028	Aktif
30	DPC Kutai Timur	07 Mei 2025 – 07 Mei 2029	Aktif
31	DPC Lombok Timur Raya	29 Agustus 2022 – 29 Agustus 2026	Aktif

No.	Nama DPC	Masa Bakti Kepengurusan	Keterangan
32	DPC Madiun Raya	13 Mei 2022 – 13 Mei 2026	Aktif
33	DPC Makassar	14 Februari 2026	• Aktif • Menunggu laporan Muscab
34	DPC Malang Raya	03 November 2022 – 03 November 2026	• Aktif • Sudah Muscab dan menunggu laporan Muscab
35	DPC Manado	21 Juli 2025 – 21 Juli 2029	• Aktif
36	DPC Mataram	07 Februari 2022 – 07 Februari 2026	• Aktif • Telah Muscab dan menunggu laporan Muscab
37	DPC Medan	13 Mei 2022 – 13 Mei 2026	Aktif
38	DPC Padang	24 Januari 2026	• Aktif • Laporan Muscab sedang diproses
39	DPC Pekanbaru	28 Januari 2026 – 28 Januari 2030	Aktif
40	DPC Pontianak	21 Maret 2022 – 21 Maret 2026	• Aktif • Telah mengadakan Muscab 25 April 2026 namun laporan Muscab belum disampaikan kepada DPN
41	DPC Purwokerto	29 November 2024 – 29 November 2028	Aktif
42	DPC Salatiga Raya	29 November 2024 – 29	Diminta Muscab

No.	Nama DPC	Masa Bakti Kepengurusan	Keterangan
		November 2028	ulang
43	DPC Samarinda	21 April 2024 – 21 April 2028	Aktif
44	DPC Semarang	06 Juni 2022 – 06 Juni 2026	Aktif
45	DPC Serang	19 Juni 2023 – 19 Juni 2027	Aktif
46	DPC Siantar Simalungun	26 Oktober 2021 – 26 Oktober 2025	Belum Muscab, sudah mengkirimkan surat permohonan perpanjangan SK pengurus (08 April 2026)
47	DPC Sukabumi	07 Februari 2026	• Aktif • Laporan Muscab sedang diproses
48	DPC Sidoarjo Raya	27 November 2023 – 27 November 2027	Aktif
49	DPC Surabaya Raya	08 April 2026	• Aktif • Menunggu laporan Muscab
50	DPC Tangerang Raya	21 Maret 2022 – 21 Maret 2026	• Aktif • Menunggu laporan Muscab
51	DPC Tanjung Selor	04 April 2026	Aktif
52	DPC Banjarmasin	25 November 2015 – 25 November 2019	Non aktif
53	DPC Masohi	12 Mei 2017 – 12 Mei 2021	Non aktif
54	DPC Saumlaki	12 Mei 2017 – 12 Mei 2021	Non aktif
55	DPC Tual	12 Mei 2017 – 12 Mei	Non aktif

No.	Nama DPC	Masa Bakti Kepengurusan	Keterangan
		2021	
Jumlah DPC Aktif			**51**
Jumlah DPC Non Aktif			**4**
Total			**55**

DAFTAR GUGUS TUGAS PERADI SAI DI SELURUH INDONESIA

No.	Nama Gugus Tugas	Masa Bakti Kepengurusan	Keterangan
1	Indramayu Raya	12 Desember 2022 – 12 Desember 2023	Perpanjangan masa tugas
2	Lamongan Raya	14 Oktober 2022 – 14 Oktober 2023	Akan dilakukan perpanjangan masa tugas
3	Palembang	21 Desember 2022 – 21 Desember 2023	Perpanjangan masa tugas 3 bulan
4	Sumedang Raya	06 Juni 2025 – 06 Juni 2026	Aktif
5	Kabupaten Sukabumi	17 Juni 2025 – 17 Juni 2026	Sedang proses verifikasi data anggota
6	Bontang	08 Juli 2025 – 09 Juli 2026	Aktif
7	Jember Raya	09 Juli 2025 – 09 Juli 2026	Aktif
8	Garut	13 Agustus 2025 – 13 Agustus 2026	Aktif

2. Sehubungan dengan pelaksanaan program kerja konsolidasi dengan DPC, Gugus Tugas, dan Korda, DPN PERADI SAI, yang diwakili oleh KOMORTA, telah secara

aktif menghadiri berbagai Muscab maupun pelantikan DPC-DPC PERADI SAI di seluruh Indonesia.

REKAPITULASI PELAKSANAAN MUSCAB
DAN PELANTIKAN DPC PERADI SAI SELURUH INDONESIA
AGUSTUS 2025 – APRIL 2026

No	DPC	Kegiatan	Waktu	Tim Yang Bertugas
1	Gorontalo	Muscab	30 Agustus 2025	Liston Sibarani
2	Cianjur	Muscab	15 November 2025, Delaga Biru Hotel	• Jahmada Girsang • Jemmy Mokolengsang
3	Pekanbaru	Muscab	29 November 2025, Pangeran Hotel – Pekanbaru	• Jahmada Girsang Nimran • Abdurahman
4	Gorontalo	Pelantikan	29 November 2025, Grand Q Hotel – Gorontalo	• Ketua Umum DPN • Jemmy Mokolensang
5	Serang	Pelantikan pengurus antar waktu	16 Desember 2025, Sekretariat DPC Peradi SAI Kota Serang	• Jahmada Girsang • Nimran Abdurahman
6	Padang	Muscab III	24 Januari 2026, Hotel Pangeran Beach	Jahmada Girsang
7	Indragiri Raya	Muscab	24 Januari 2026, Aula Hotel Inhil Pratama –	• Jahmada Girsang • Fajar Gora

No	DPC	Kegiatan	Waktu	Tim Yang Bertugas
			Tembilahan, Riau	Via zoom
8	Pekanbaru	Pelantikan	30 Januari 2026, Pangeran Hotel – Pekanbaru	Ketua Umum DPN
9	Bengkulu	Muscab	31 Januari 2026	Fadjar Marpaung
10	Jakarta Barat	Muscab	8 Agustus 2025	Harris Marbun
11	Sukabumi	Muscab	7 Februari 2026	Magdi Jhon Girsang
12	Makassar	Muscab	14 Februari 2026	Jahmada Girsang
13	Tanjung Selor	Muscab dan pelantikan	04 April 2026	• Ketua Umum DPN • Nimran Abdurahman
14	Surabaya Raya	Muscab	08 April 2026	Jahmada Girsang
15	Jakarta Utara	Muscab	14 Maret 2026	Daud Barue David
16	Tangerang Raya	Muscab	10 April 2026	• Sekjen DPN • Daud Barue David • Kurnia Girsang
17	Mataram	Muscab	11 April 2026	Jahmada Girsang
18	Malang Raya	Muscab	11April 2026, Hotel Harris Conventions – Malang	Fadjar Marpaung
19	Jakarta Utara	Pelantikan	24 April 2026, The Tavia Heritage Hotel	• Ketua Umum DPN • Sekjen DPN • Beatrix Nidya Pontolaeng
20	Pontianak	Muscab	25 April 2026, Hotel Maestro - Pontianak	Jahmada Girsang
21	Manado	Pelantikan	25 April 2026,	• Ketua Umum

No	DPC	Kegiatan	Waktu	Tim Yang Bertugas
			Grnad Puri Hotel - Manado	DPN • Jemmy Mokolensang
22	Bandar Lampung	Pelantikan	29 April 2026, Emersial Hotel – Bandar Lampung	• Daud Barue David • Beatrix Nidya Pontolaeng
Total				**19 DPC**

3. Hingga April 2026 ini, DPN PERADI juga tengah menyiapkan pembentukan Gugus Tugas baru dalam rangka pembentukan DPC baru PERADI SAI, yaitu sebagai berikut:

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS BARU PER APRIL 2026

Kota / Kabupaten	Keterangan
Pasaman Raya, Sumatera Barat	Surat pengantar DPC Padang (induk)
Solok Raya, Sumatera Barat	Surat pengantar DPC Padang (induk)
Bukittinggi, Sumatera Barat	Surat pengantar DPC Padang (induk)
Seram Raya, Maluku	Surat pengantar DPD Maluku
Boolang Mangondow Raya, Sulawesi Utara	Menunggu surat pengajuan anggota
Bima Raya (Kota/Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu), Nusa Tenggara Barat	Menunggu surat pengajuan anggota

4. Kegiatan sosialisasi perubahan nomenklatur organisasi dari Perhimpunan menjadi Perkumpulan dilaksanakan di Sekretariat Nasional ("**Seknas**") PERADI SAI, yang dipimpin oleh Ketua Umum PERADI SAI, sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada Pengurus Harian dan pengurus DPC seluruh Indonesia.

5. Berkat kerja serius segenap anggota DPN PERADI SAI dalam menjalankan berbagai program kerja yang berkaitan dengan rekrutmen calon Advokat baru dan juga pelaksanaan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan benefit kepada para Advokat yang telah menjadi anggota PERADI SAI, per April 2026, keanggotaan para Advokat di PERADI SAI telah mencapai **11.109 (sebelas ribu seratus sembilan)** Advokat yang tersebar di seluruh Indonesia. Keanggotaan para Advokat tersebut juga sekaligus terdaftar di DPC-DPC PERADI SAI yang wilayahnya mencakup wilayah kantor dari para Advokat anggota PERADI SAI.

   Berikut data persebaran Advokat anggota PERADI SAI di DPC-DPC PERADI SAI Per April 2026.

DAFTAR PERSEBARAN ANGGOTA PERADI SAI

No.	Nama DPC	Jumlah Anggota
1	DPC Aceh	63
2	DPC Ambon	185
3	DPC Balikpapan	47
4	DPC Bandung	329
5	DPC Banjarmasin	17
6	DPC Banyuwangi Raya	56
7	DPC Batam	171
8	DPC Bekasi Raya	191
9	DPC Bengkulu	147
10	DPC Bogor Raya	112
11	DPC Bandar Lampung	43
12	DPC Cianjur	16
13	DPC Deli Serdang	42
14	DPC Denpasar	556
15	DPC Gorontalo	103
16	DPC Gresik Raya	29

No.	Nama DPC	Jumlah Anggota
17	DPC Halmahera Utara	14
18	DPC Indragiri Raya	47
19	DPC Indramayu Raya (Gugus Tugas)	0
20	DPC Jakarta Barat	242
21	DPC Jakarta Pusat	371
22	DPC Jakarta Selatan	1462
23	DPC Jakarta Timur	244
24	DPC Jakarta Utara	435
25	DPC Kota Jambi	59
26	DPC Kota Jayapura	80
27	DPC Kampar	7
28	DPC Karawang	184
29	DPC Kediri Raya	186
30	DPC Kendari	71
31	DPC Kutai Barat	25
32	DPC Kutai Timur	22
33	DPC Lamongan Raya (Gugus Tugas)	0
34	DPC Lombok Timur Raya	37
35	DPC Madiun Raya	53
36	DPC Makassar	367
37	DPC Malang Raya	588
38	DPC Manado	32
39	DPC Masohi	0
40	DPC Mataram	168
41	DPC Medan	690
42	DPC Padang	663
43	DPC Palembang (GUGUS TUGAS)	28
44	DPC Pekanbaru	527

No.	Nama DPC	Jumlah Anggota
45	DPC Pontianak	42
46	DPC Purwokerto	27
47	DPC Salatiga Raya	23
48	DPC Samarinda	484
49	DPC Saumlaki	0
50	DPC Semarang	98
51	DPC Serang	54
52	DPC Siantar Simalungun	36
53	DPC Sukabumi	265
54	DPC Sidoarjo Raya	113
55	DPC Surabaya Raya	587
56	DPC Sumedang Raya (Gugus Tugas)	0
57	DPC Tangerang Raya	433
58	DPC Tanjung Selor	35
59	DPC Tual	6
60	DPC Kabupaten Sukabumi (Gugus Tugas)	0
61	DPC Bontang (Gugus Tugas)	0
62	DPC Jember Raya (Gugus Tugas)	0
63	Kabupaten Garut (Gugus Tugas)	0
64	Advokat belum terdaftar di DPC	191
Total Keseluruhan Anggota PERADI SAI per April 2026		**11.103**

6. Terkait program kerja pengembangan sistem database anggota berbasis digital, DPN PERADI SAI saat ini sedang dalam proses untuk mengembangkan suatu sistem keanggotaan anggota yang bersifat komprehensif. Nantinya sistem tersebut akan berisi data-data Advokat anggota PERADI SAI mulai dari yang bersangkutan mengikuti PKPA hingga diangkat menjadi Advokat, termasuk informasi terkait keanggotaan para Advokat tersebut di DPC-DPC PERADI SAI yang wilayah kewenangannya mencakup area kantor para Advokat anggota PERADI SAI,

informasi terkait pelanggaran kode etik profesi Advokat yang dilakukan oleh Advokat tertentu (apabila ada). Sistem database ini direncanakan dapat rampung paling lambat pada akhir tahun 2026 ini.

VIII. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Sehubungan dengan program kerja ini, DPN PERADI cq. Komite Pengembangan Kompetensi sedang dalam tahap penyusunan konsep kegiatan *continuing legal education* yang dapat diikuti oleh anggota PERADI SAI. Kegiatan *continuing legal education* ini nantinya dapat diikuti secara daring maupun langsung (tatap muka). Tema-tema kegiatan *continuing legal education* yang diadakan akan menyesuaikan dengan kebutuhan anggota dan dengan memperhatikan isu-isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat.

Selain itu dalam rangka pelaksanaan program kerja ini, Komite Pengembangan Kompetensi juga secara aktif mencari informasi dan menjajaki kesempatan untuk mendapatkan kursi yang akan dialokasikan kepada Advokat anggota PERADI SAI agar dapat secara gratis di berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga negara, antara lain: BPSDM Kementerian Hukum Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan lain-lain.

IX. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG HUKUM INVESTASI DAN EKONOMI

Selain bertujuan mengembangkan kompetensi anggota di bidang hukum investasi dan ekonomi, keberadaan program kerja ini juga bertujuan agar PERADI SAI dapat berperan serta dalam pengembangan hukum investasi dan ekonomi di Indonesia.

Dimotori oleh Komite Hukum Investasi dan Ekonomi DPN PERADI SAI, Berikut adalah beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan maupun akan dilaksanakan oleh PERADI SAI berkaitan dengan program kerja hukum investasi dan ekonomi.

1. Kompetisi Esai - Telah selesai dilaksanakan dengan baik

a. Kegiatan Kompetisi ESAI PERADI SAI ini dilaksanakan sebagai bagian dari program kerja Komite dan telah dilaksanakan dengan baik. Topik esai yang dipilih adalah: "**Penguatan Kerangka Hukum untuk Akselerasi Investasi Indonesia**".

b. Topik yang telah dipilih bertujuan memberikan kajian berupa analisis, masukan, pertimbangan, dan rekomendasi strategis dari perspektif advokat sebagai pelaksana kebijakan dan regulasi.

c. Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta dan 6 pemenang telah terpilih pada tanggal 15 Desember 2025.

d. Adapun manfaat dari kompetisi ini adalah sebagai berikut:
   - pengumpulan data dan informasi akademis terkait dengan isu yang dibahas serta rekomendasi publik terkait dengan penyelesaian isu tersebut dari perspektif masyarakat luas sebagai bagian dan basis data kajian;

   - memperkuat citra PERADI SAI dalam memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dengan memberikan wadah intelektual dalam menyuarakan pemikiran bagi pembangunan Indonesia;

- memberikan manfaat keuangan bagi pemenang dan/atau kesempatan bagi pemenang untuk dapat mengikuti Program Pendidikan Advokat PERADI SAI tanpa biaya.

e. Berikut adalah informasi pemenang dari kompetensi ini dan hadiah yang diberikan oleh Komite Hukum Investasi dan Ekonomi kepada para pemenang:
   - Juara 1: Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Michael H. Hadylaya, dengan judul esai *"Family Office dan Masa Depan Hukum Investasi Indonesia"*.

   - Juara 2: Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Rainova Rahaniawan, dengan judul esai *"Menuju Regulatory Agility: Rekonstruksi Kerangka Hukum Investasi Berkaca Pada Fleksibilitas Regulasi Vietnam"*.

   - Juara 3, Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), Fatma Putri Fadilah, dengan judul esai *"Reformulasi Kebijakan Pembentukan Family Office di Kawasan Ekonomi Khusus Sebagai Katalisator Terhadap Peningkatan Penanaman Modal Asing Bagi Indonesia".*

   - Juara 4, hadiah berupa keikutsertaan pada PKPA PERADI SAI tanpa dipungut biaya, Willion Lim, dengan judul esai *"Penguatan Kerangka Hukum untuk Akselerasi Investasi Indonesia*".

   - Juara 5, hadiah berupa keikutsertaan pada PKPA PERADI SAI tanpa dipungut biaya, Muhammad Mujab Nabil, dengan judul esai *"Rekonstruksi Tata Kelola Regulasi Melalui Instrumen National Hybrid Regulatory Coherence Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Dalam Mengakselerasi Ekosistem Investasi Nasional"*.

   - Juara 6, Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Kristianus Jimy Pratama dengan judul esai, "*Regulatory Precision as Economic Strategy: Accelerating Indonesia's Investment Pipeline".*

2. **Rencana Seminar Nasional KUHP dan KUHAP BARU – dalam tahap persiapan pelaksanaan**

   a. Tema seminar yang dipilih adalah "**Implementasi KUHP Baru dalam Konteks Pertanggungjawaban Pidana Korporas**i".

   b. Tujuan pelaksanaan adalah pemahaman yang komprehensif bagi peserta seminar yang meliputi pemilik perusahaan, direksi dan komisaris, manajemen perusahaan, *in-house legal*, professional c*ompliance* dan *risk management*, praktisi hukum, akedemisi terkait beberapa aspek baru di KUHP.

   c. Seminar ini direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan Juni 2026 di Jakarta.

   d. Seminar ini dikonsepkan untuk menjadi seminar berbayar, dimana pemasukan dari kontribusi peserta dan sponsor akan menjadi pemasukan PERADI SAI untuk digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PERADI SAI lainnya.

3. **Pekerjaan dengan World Bank – sedang berjalan**

   a. Proposal telah diajukan pada bulan Februari 2026 dan PERADI SAI telah memenangkan pekerjaan ini. DPN dalam hal ini diwakili oleh: (i) Komite Hukum Ekonomi & Investasi; dan (ii) Komite Diplomasi Global.

   b. Nama Proyek Pekerjaan adalah "**Subnational Business Ready in Indonesia**". Pekerjaan ini merupakan sebuah proyek yang dilaksanakan oleh World Bank Group terkait *Business Entry*, *Property Transfer*, dan *Dispute Resolution* sehubungan dengan kegiatan usaha di 10 kota di Indonesia, yaitu Balikpapan, Banda Aceh, Bandung, Batam, Denpasar, Jakarta, Makassar, Medan, Semarang, dan Surabaya.

   c. Jangka Waktu Pekerjaan selama 10 (sepuluh) bulan, dimulai dari bulan Maret 2026.

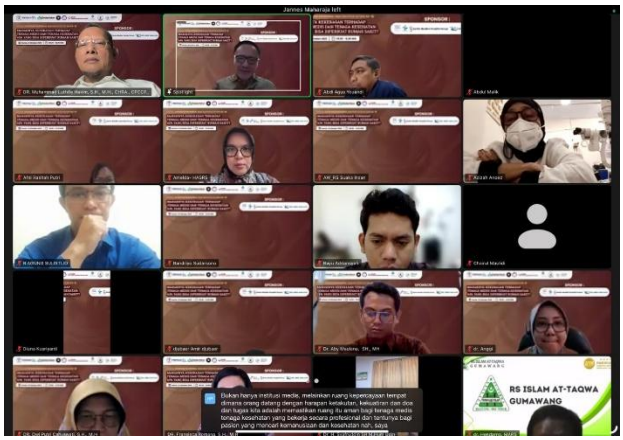
X. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG KAJIAN DAN ISU STRATEGIS

Program kerja ini dibuat dengan tujuan PERADI SAI dan para advokat yang menjadi anggotanya memperoleh informasi terkini terkait isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat, khususnya isu-isu yang berkaitan dengan penegakan hukum. Selain itu, program kerja ini juga bertujuan untuk menjaring masukan-masukan Advokat anggota PERADI SAI terhadap isu-isu tersebut untuk kemudian disalurkan kepada instansi yang berwenang.

Terkait program kerja ini, DPN PERADI SAI, dimotori oleh Komite Kajian dan Isu Strategis, bekerja sama dengan HASRS (Himpunan Advokat Spesialis Rumah Sakit), pada tanggal 23 Oktober 2025 telah mengadakan suatu webinar bertema "Maraknya Kekerasan terhadap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan: Apa yang bisa diperbuat Rumah Sakit?"

Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan webinar tersebut





XI. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG ADVOKASI DAN BANTUAN HUKUM

Terkait program kerja bidang advokasi dan bantuan hukum ini, dalam kurun waktu Agustus 2025 sampai dengan April 2026, DPN PERADI SAI, melalui Komite Advokasi dan Bantuan Hukum, telah melakukan beberapa hal, yaitu:

a. Penguatan internal berupa pembuatan struktur internal tim pelaksana, pembuatan prosedur standar operasi pelaksanaan advokasi dan pemberian bantuan hukum, serta tinjauan atas kegiatan advokasi dan bantuan hukum yang selama ini dilaksanakan dalam rangka mencari format terbaik kegiatan advokasi yang akan dilaksanakan DPN PERADI SAI periode 2025 – 2030. Kegiatan ini dimulai pada September 2025 dan masih berlangsung hingga saat ini.

b. Pembelaan profesi, yaitu menangani kasus dugaan kriminalisasi/pelanggaran hak imunitas Advokat yang dilakukan terhadap salah satu pengurus PERADI SAI. Kasus ini ditangani bersama oleh Komite Advokasi dan Bantuan Hukum, Komite Pembelaan Profesi Advokat, Komite Integritas Profesi, serta KOMPA. Penanganan kasus ini dmulai pada November 2025 dan hingga saat ini masih ditangani oleh DPN PERADI SAI.

c. Pemberian bantuan hukum berupa pendampingan terhadap korban atas perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada atlet Federasi Panjat Tebing Indonesia. Pendampingan ini ditangani bersama oleh Komite Advokasi dan Bantuan Hukum dengan komite lainnya di DPN PERADI SAI. Pemberian bantuan hukum ini dimulai pada Maret 2026 dan masih berlangsung hingga dibuatnya laporan ini.

d. Pembentukan Sentra Layanan Bantuan Hukum yang akan menjadi untuk tempat berkoordinasi pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum yang dilakukan oleh PERADI SAI.

XII. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG KEMITRAAN STRATEGIS



Dalam kerangka pelaksanaan program kerja bidang kemitraan strategis, DPN PERADI SAI telah melakukan penjajakan kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pusat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selain itu, DPN PERADI SAI, melalui Komite Kemitraan Strategis, juga membangun jejaring dengan instansi kementerian dan lembaga negara, antara lain yaitu: Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Pada Senin, 20 April 2026, DPN dan DPC PERADI SAI wilayah Jakarta bertemu dengan Bawaslu DKI Jakarta di Seknas PERADI SAI. Pertemuan membahas berbagai isu strategis, diantaranya:

- Penguatan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu;
- Optimalisasi penyelesaian sengketa pra-pemilu melalui mediasi;
- Pentingnya edukasi dan literasi hukum pemilu kepada masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, PERADI SAI dipandang sebagai mitra strategis dalam edukasi dan literasi hukum pemilu, pengawasan partisipatif, serta kajian dan masukan kebijakan. Kedua pihak sepakat untuk menjajaki kerja sama melalui berbagai program, seperti workshop, *focus group discussion* (FGD), pengembangan modul, serta kolaborasi narasumber dalam kegiatan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut, juga dibahas rencana penyusunan nota kesepahaman (MoU) guna memperkuat sinergi kelembagaan. Dengan kolaborasi ini diharapkan dapat terdapat

kontribusi nyata dalam menciptakan proses yang lebih berkualitas, transparan, dan berintegritas.

XIII. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG PERLINDUNGAN ADVOKAT

Dalam periode Agustus 2025 sampai dengan April 2026, DPN PERADI SAI, melalui Komite Perlindungan Advokat telah melakukan berbagai hal terkait dengan pelaksanaan program kerja bidang perlindungan Advokat, diantaranya yaitu:

1. Mendampingi dan menangani kriminalisasi profesi Advokat yang terjadi terhadap 5 orang Advokat anggota PERADI SAI, yaitu:
   a. 2 orang anggota di Kalimantan Timur;
   b. 1 orang anggota di Sumatera Utara;
   c. 1 orang anggota di Jakarta yang juga menjadi pengurus DPN;
   d. 1 orang anggota di Bengkulu.

2. Melakukan rapat koordinasi dengan Penyidik Polres Tarakan, Kalimantan Utara pada tanggal 15 Oktober 2025, dalam rangka penanganan kasus yang sedang ditangani oleh Komite Perlindungan Advokat.

3. Bertemu dengan Moh. Rahman Thohir "Ojol Taruna" pada tanggal 4 September 2025 dalam rangka mendapatkan kejelasan informasi seputar pemberitaan terkait status yang bersangkutan sebagai Advokat yang juga menjalani pekerjaan sebagai ojek *online*. Pemberitaan mengenai yang bersangkutan bermula pada saat yang bersangkutan, dalam kapasitasnya sebagai pengemudi ojek *online*, bersama dengan beberapa rekan pengemudi ojek *online* lainnya bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menyampaikan aspirasi para pengemudi ojek *online* di tengah-tengah maraknya demonstrasi yang dilakukan para pengemudi ojek online terhadap pemerintah. Pemberitaan tersebut menjadi viral



mengingat gaya bicara yang bersangkutan yang dinilai oleh sebagian kalangan bukan merupakan gaya bicara mereka yang umumnya menekuni pekerjaan ojek *online* sehingga kemudian menilai bahwa pertemuan tersebut merupakan rekayasa yang dibuat pemerintah. Setelah DPN PERADI SAI menemui yang bersangkutan di kantor Seknas PERADI SAI, yang bersangkutan menjelaskan bahwa benar ia adalah Advokat dan pemegang Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan PERADI, namun kartu tersebut saat ini sudah habis masa berlakunya dan belum ia perpanjang lagi. Yang bersangkutan menjelaskan bahwa mengingat latar belakangnya yang pernah menjadi Advokat maka tidak perlu dipertanyakan lagi apabila *public speaking*-nya memang terkesan lebih baik dari beberapa pengemudi ojek online yang saat itu bertemu dengan Wakil Presiden. DPN PERADI SAI, dalam pertemuan tersebut menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa sebagai organisasi advokat yang menaungi para Advokat yang menjadi anggota, PERADI SAI menegaskan akan memberikan perlindungan dan dukungan kepada setiap Advokat dalam menjalankan profesinya, termasuk kepada Moh. Rahman Thohir.

XIV. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG INTEGRITAS PROFESI

Program kerja bidang integritas profesi merupakan penjabaran dari visi DPN PERADI SAI menciptakan Advokat yang berintegritas, profesional, dan berperan aktif dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Program kerja ini dimotori oleh Komite Integritas Profesi yang merupakan bagian dari DPN PERADI SAI.

Beberapa kegiatan yang menjadi program kerja DPN PERADI SAI di bidang integritas profesi yaitu:

1. Pembentukan Dewan Kehormatan Daerah ("**DKD**") PERADI SAI di tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia

   Pembentukan DKD akan dilakukan di tiap-tiap ibukota provinsi di seluruh Indonesia. DKD ini bertugas mengadili segala laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi Advokat terhadap Advokat tertentu yang domisili kantornya masuk dalam wilayah kewenangannya.

   Pembentukan DKD akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
   a. pembentukan panitia seleksi;
   b. menetapkan persyaratan calon anggota DKD;
   c. penjaringan dan nominasi calon;
   d. verifikasi dan wawancara;
   e. penetapan dan pengesahan hasil seleksi;
   f. pelantikan dan pembekalan.

2. Memastikan pergantian anggota DKD tepat waktu sesuai dengan AD/PRT PERADI SAI

   Hal ini dilakukan dengan melakukan pemantauan berkala terhadap masa jabatan setiap anggota DKD PERADI SAI.

3. Memastikan tindak lanjut atas setiap keputusan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan sehubungan dengan perkara dugaan pelanggaran kode etik profesi Advokat yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

4. Penghubung antara Dewan Kehormatan PERADI SAI (pusat maupun daerah) dengan Komisi Pengawas

5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Advokat terhadap kode etika profesi Advokat

   Komite Integritas Profesi, berkoordinasi dengan Komite Pendidikan Profesi Advokat, akan membuat mempersiapkan panduan bahan pengajaran mengenai kode etik profesi Advokat yang akan diajarkan pada PKPA PERADI SAI dalam rangka menjamin kualitas materi yang disampaikan oleh setiap pengajar mata pelajaran kode etik profesi Advokat. Pembuatan Materi PKPA kode etik yang baik dan standar diharapkan akan melahirkan Advokat yang berintegritas.

XV. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG BUDAYA DAN OLAHRAGA

Pada Minggu, 14 Desember 2025, PERADI SAI, yang dimotori oleh Komite Budaya dan Olahraga DPN PERADI SAI, menyelenggarakan kegiatan *Sunday Funwalk* di kawasan *Car Free Day* (CFD) Jakarta. Kegiatan ini menjadi wadah kebersamaan dan silaturahmi yang dikemas secara santai dan sehat, dilengkapi dengan *snack*, *drinks*, *coffee*, *refreshment*, serta hiburan akustik *live music*.





XVI. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG KREATIVITAS DAN KEBERSAMAAN

Program kerja ini dilaksanakan oleh Komite Kreativitas dan Kebersamaan yang merupakan bagian dari pengurus DPN PERADI SAI. Sebagai salah satu wujud pelaksanaan program kerja bidang kreativitas dan kebersamaan, pada 4 Desember 2025, PERADI SAI telah melakukan aksi berbagi kasih di Panti Asuhan dan Sekolah Luar Biasa Elsafan dalam rangka merayakan Natal 2025.





XVII. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL

DPN PERADI SAI, yang dimotori oleh Komite Tanggung Jawab Sosial, telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu:

1. White Cane Safety Day 2025

DPN PERADI SAI bekerja sama dengan Lions Club Indonesia (Distrik 307 B1) dalam rangka mendukung dan memberdayakan penyandang disabilitas netra di wilayah Jabodetabek.

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa wilayah, yaitu Jakarta Timur, Bogor Timur, Bekasi, Tangerang Selatan, dan Kota Tangerang, dengan melibatkan lebih dari 1.000 penyandang disabilitas netra serta ratusan relawan.

Dalam kegiatan ini, Komite Tanggung Jawab Sosial DPN PERADI SAI berhasil menghimpun dan menyalurkan sebanyak 331 paket bantuan dengan estimasi nilai sebesar Rp82.750.000,- (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Kegiatan ini juga mendapatkan publikasi di media nasional, antara lain SINDOnews, yang menyoroti peran PERADI SAI dalam mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

2. Program PERADI SAI Tanggap Bencana

Dimotori oleh Komite Tanggung Jawab Sosial, DPN PERADI SAI menginisiasi program penggalangan dana kemanusiaan bagi korban bencana banjir di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program ini berhasil menghimpun donasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat pada tanggal 4 Desember 2025 untuk didistribusikan kepada wilayah terdampak.

Kegiatan penyerahan donasi tersebut juga telah dipublikasikan melalui media nasional, antara lain siaran Radio Republik Indonesia (RRI).

Secara keseluruhan selama kurun waktu Agustus 2025 – April 2026, pelaksanaan program kerja ini, yang dimotori oleh Komite Tanggung Jawab Sosial, telah memberikan kontribusi sosial dengan total nilai manfaat mencapai ± Rp182.750.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), serta menjangkau masyarakat luas, khususnya penyandang disabilitas dan korban bencana alam.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen PERADI SAI dalam menjalankan peran advokat tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab sosial dan kemanusiaan.

XVIII. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI

Key Highlights dan Capaian

Selama periode Agustus 2025 – April 2026, DPN PERADI SAI, dalam hal ini Komite Komunikasi dan Publikasi, telah berhasil menjalankan peran strategis sebagai integrator komunikasi di lingkungan organisasi, meningkatkan visibilitas digital, serta memperkuat positioning institusi secara konsisten.

Peran Strategis sebagai Integrator Komunikasi

DPN PERADI SAI, melalui Komite Komunikasi dan Publikasi, telah memposisikan diri sebagai pusat integrasi informasi (hub) yang menghubungkan berbagai pilar organisasi. Peran ini diwujudkan melalui sinkronisasi pesan dari berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh berbagai komite di dalam DPN PERADI SAI, koordinasi intensif antara DPN dan DPC, hingga publikasi agenda strategis di tingkat internasional dan sosial. Dengan peran ini, seluruh program kerja organisasi tidak lagi berjalan secara terisolasi, melainkan teramplifikasi secara terintegrasi melalui satu pintu komunikasi yang searah.

Transformasi dan Peningkatan Visibilitas Digital

Upaya optimalisasi kanal digital selama periode ini membuahkan hasil yang signifikan, yang dibuktikan dengan pertumbuhan organik jumlah pengikut (*followers*) dari 11.4K menjadi 14.2K, atau setara dengan kenaikan sebesar 24.5%. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan strategi konten dalam menarik minat audiens yang lebih luas. Analisis terhadap data tersebut menunjukkan adanya peningkatan eksposur publik dan tingkat keterlibatan (*engagement*) yang lebih tinggi terhadap aktivitas harian maupun program kerja besar organisasi.

Penguatan *Positioning* Institusi di Ranah Publik

DPN PERADI SAI, dalam hal ini Komite Komunikasi dan Publikasi, secara aktif membangun dan memperkuat citra PERADI SAI sebagai organisasi advokat yang profesional, kredibel, dan senantiasa relevan. Hal ini dicapai dengan memastikan

bahwa setiap respons organisasi terhadap isu hukum nasional dan program pengembangan profesi tersampaikan dengan tepat kepada publik. Melalui narasi yang konsisten, organisasi kini dipandang sebagai institusi yang responsif terhadap dinamika hukum dan berkomitmen penuh pada standar profesionalisme advokat.

Konsistensi Brand dan Standarisasi Komunikasi

Untuk mendukung kredibilitas institusi, DPN PERADI SAI cq. Komite Publikasi dan Komunikasi telah menetapkan standar kualitas dan keseragaman pesan di seluruh kanal komunikasi. Upaya ini mencakup proses *refreshment* pada identitas visual atau *brand* institusi, guna memastikan bahwa identitas PERADI SAI tampil modern dan konsisten baik di media sosial, portal berita, maupun materi publikasi cetak. Langkah ini sangat penting untuk menjaga integritas visual organisasi di mata anggota maupun pemangku kepentingan eksternal.

ELABORASI CAPAIAN KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI STRATEGIS

A. Penguatan Organisasi dan Keanggotaan (*Internal Affairs*)

Dalam upaya memperkuat struktur internal, fokus komunikasi diarahkan pada peningkatan visibilitas eksistensi DPC serta mendokumentasikan konsistensi pertumbuhan organisasi secara nasional. Strategi ini diimplementasikan melalui publikasi rangkaian kegiatan wajib organisasi, mulai dari pendidikan profesi hingga seremoni pelantikan.

- **Capaian Utama:** DPN PERADI SAI cq. Komite Komunikasi dan Publikasi, telah berhasil mengelola narasi publikasi atas pengangkatan dan pelantikan kepengurusan DPC di berbagai wilayah strategis seperti Semarang, Gorontalo, Pekanbaru, Tangerang Raya, Sidoarjo, Malang Raya, hingga Tanjung Selor. Selain itu, publikasi masif juga dilakukan pada momentum pelantikan Advokat di Surabaya Raya, Padang, Bali, dan Kalimantan Timur, guna mempertegas peran PERADI SAI dalam mencetak praktisi hukum berkualitas.

B. Advokasi, Kebijakan, dan Government Relations

Sebagai mitra strategis pemerintah, publikasi difokuskan untuk menunjukkan pengaruh dan kontribusi nyata PERADI SAI dalam pembangunan hukum nasional.

Komite bertugas memastikan suara dan masukan institusi didengar oleh para pemangku kepentingan.

- **Capaian Utama:** Publikasi keterlibatan aktif dalam agenda legislatif, seperti Rapat Dengar Pendapat ("**RDP**") pengesahan KUHAP yang dilaksanakan pada 24 November 2025 dan Rapat Dengar Pendapat Umum ("**RDPU**") RUU Hukum Acara Perdata di Komisi III DPR-RI. Komite juga menyusun narasi strategis terkait keterlibatan *Judicial Review*, penyusunan *Position Paper* reformasi POLRI yang disampaikan ke Komisi Percepatan Reformasi POLRI pada tanggal 9 Desember 2025, serta penguatan relasi melalui kunjungan ke Badan Narkotika Nasional (BNN). Hal ini memperkuat profil organisasi sebagai institusi yang vokal dan solutif.

C. Keberlanjutan Program dan Pengembangan Profesi

Pelaksanaan program kerja di bidang komunikasi dan publikasi oleh DPN PERADI SAI cq. Komite Komunikasi dan Publikasi telah berhasil menciptakan jembatan informasi guna memastikan seluruh aktivitas DPN dan perangkat organisasi lainnya dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh anggota serta masyarakat luas.

- **Capaian Utama:** Melakukan amplifikasi komunikasi atas pelantikan Pengurus DPN masa bakti 2025-2030. Selain itu, DPN melalui Komite Komunikasi dan Publikasi secara rutin mempromosikan kegiatan edukatif seperti Webinar, Seminar, dan program *Digital Online Law Course* (DOLC). Persiapan komunikasi untuk agenda besar seperti RAKERNAS juga telah dilaksanakan melalui berbagai format media untuk memastikan partisipasi maksimal dari seluruh anggota.

D. Hubungan Internasional dan Kemitraan Strategis

Untuk meningkatkan daya saing di level global, fokus komunikasi diarahkan pada eksposur kegiatan regional dan kolaborasi internasional guna menunjukkan kapasitas advokat Indonesia di mata dunia.

- **Capaian Utama:** Publikasi keikutsertaan organisasi dalam konferensi internasional melalui *ASEAN Law Association* (ALA) serta momen penting penandatanganan MoU dengan *The Law Society of Singapore*. Langkah ini membuktikan posisi PERADI SAI sebagai organisasi yang diakui secara internasional.

E. Dampak Sosial dan Keterlibatan Komunitas

Publikasi dalam kategori ini bertujuan untuk menunjukkan sisi humanis organisasi melalui aksi nyata kemanusiaan dan kepedulian sosial.

- **Capaian Utama:** melalui program kerja komunikasi dan publikasi, DPN PERADI cq. Komite Komunikasi dan Publikasi telah mendiseminasikan informasi berbagai inisiatif sosial, yang dilakukan oleh PERADI SAI, kepada anggota, mulai dari penyaluran donasi bencana, kegiatan kolaboratif bersama PMI dan panti sosial, hingga aksi solidaritas bagi rekan sejawat dan kunjungan kemanusiaan ke Rumah Tahanan Cipinang. Aktivitas ini memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan tanggung jawab sosial organisasi.

F. Branding dan Penyegaran Identitas (*New Identity*)

Seiring dengan perkembangan zaman, organisasi memerlukan penyegaran identitas agar tetap relevan dan profesional. Fokus komunikasi adalah melakukan edukasi terkait visual dan filosofi baru organisasi.

- **Capaian Utama:** DPN PERADI SAI cq. Komite Komunikasi dan Publikasi telah melakukan persiapan matang terhadap desain, kampanye materi visual, serta sosialisasi Mars organisasi yang baru. Hal ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menciptakan *brand image* yang lebih kuat, modern, dan mudah dikenali.

G. Komunikasi Berkelanjutan dan Milestone Organisasi

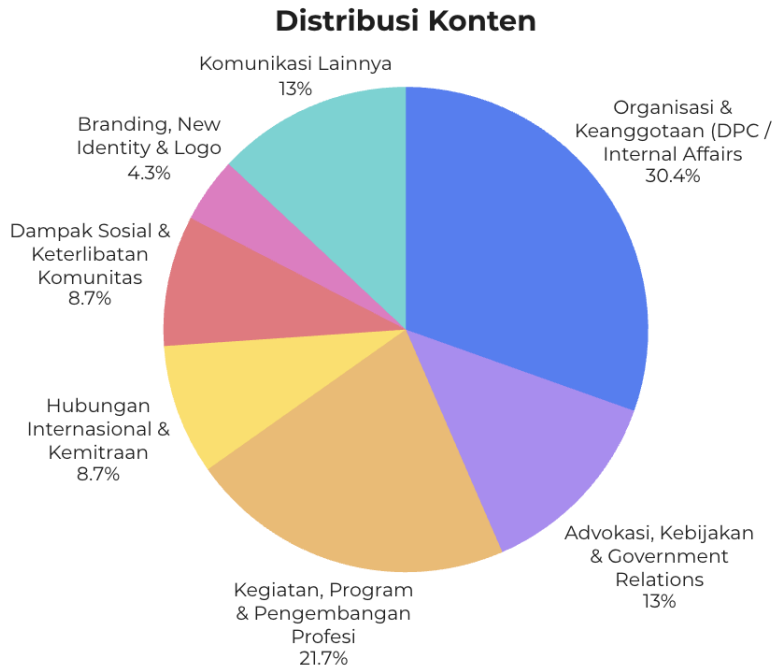
Untuk menjaga kehadiran organisasi secara konsisten di tengah masyarakat, DPN cq. Komite Komunikasi dan Publikasi senantiasa mengelola konten komunikasi rutin yang bersifat informatif dan seremonial.

- **Capaian Utama:** Pengelolaan konten ucapan hari besar nasional dan keagamaan yang dirancang secara profesional, serta pelaksanaan kampanye *milestone* penting seperti ulang tahun organisasi. Upaya ini memastikan identitas organisasi tetap melekat (*top of mind*) di hati para anggota dan publik secara konsisten.

Key Metrics dan Kinerja Media Sosial

Selama periode Agustus 2025 hingga April 2026, DPN PERADI SAI cq. Komite Komunikasi dan Publikasi menunjukkan kinerja yang positif dalam melaksanakan program kerja bidang komunikasi dan publikasi, terutama dalam pengelolaan komunikasi digital, khususnya melalui platform Instagram sebagai kanal utama publikasi.

Distribusi Konten



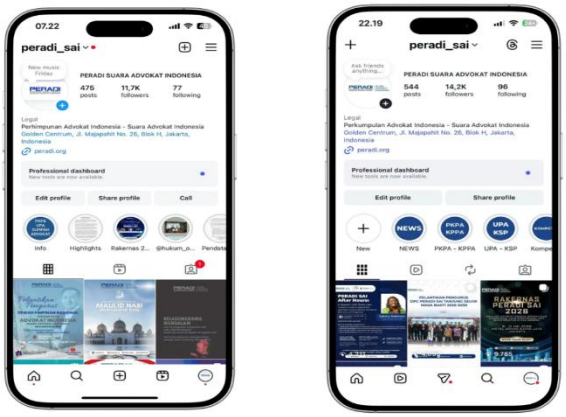
Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan konten yang diproduksi, distribusi konten terbagi ke dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

- **Organisasi dan Keanggotaan (30,4%)** : Merupakan porsi terbesar, mencakup publikasi kegiatan DPC, pelantikan, serta aktivitas internal organisasi.
- **Kegiatan, Program dan Pengembangan Profesi (21,7%)** : Meliputi kegiatan seminar, pelatihan, dan program peningkatan kapasitas anggota.
- **Advokasi, Kebijakan & Government Relations (13%)** : Berisi konten terkait keterlibatan organisasi dalam isu hukum dan kebijakan publik, termasuk partisipasi dalam pembahasan rancangan undang-undang.
- **Komunikasi Lainnya (13%)** : Konten umum seperti pengumuman, informasi singkat, dan *update* kegiatan.

- **Hubungan Internasional & Kemitraan (8,7%)** : Mencakup kerja sama dengan organisasi hukum internasional dan kegiatan lintas negara.
- **Dampak Sosial dan Keterlibatan Komunitas (8,7%)** : Termasuk kegiatan sosial, donasi, serta inisiatif kemasyarakatan.
- ***Branding*, *New Identity*, dan Logo (4,3%)** : Berupa penguatan identitas visual organisasi, termasuk pembuatan logo dan materi *branding*.

Distribusi ini menunjukkan bahwa fokus utama komunikasi organisasi berada pada penguatan struktur internal dan aktivitas keanggotaan, tanpa mengabaikan peran strategis dalam advokasi hukum serta hubungan eksternal.

Pertumbuhan Instagram



Sept 2025 April 2026

Selama periode pelaporan, akun Instagram PERADI SAI mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan rincian sebagai berikut:

- **Awal periode (Oktober 2025):** 11.4K followers
- **April 2026:** 14.2K followers
- **Total pertumbuhan:** +2.8K followers (**+24,5%**)

Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan visibilitas organisasi di ranah digital, yang didorong oleh konsistensi publikasi konten serta pemanfaatan momentum kegiatan besar organisasi.

Selain itu, penggunaan format konten yang variatif, khususnya reels, turut berkontribusi dalam menjangkau audiens yang lebih luas di luar jaringan internal organisasi.

Faktor Pendorong Pertumbuhan

Peningkatan performa media sosial PERADI SAI dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. **Konsistensi Publikasi Konten** : Produksi konten yang dilakukan secara rutin menjaga keberlangsungan interaksi dengan audiens.
2. **Momentum Kegiatan Organisasi** : Kegiatan besar seperti pelantikan, Rakernas, dan kerja sama internasional memberikan lonjakan exposure yang signifikan.
3. **Optimalisasi Konten Visual dan Video** : Format reels terbukti efektif dalam meningkatkan jangkauan (reach), termasuk konten yang mencapai puluhan ribu views.

Total *Output* Konten

Semenjak Oktober 2025 hingga April 2026, total produksi konten mencapai: **±80 output konten**, yang terdiri dari feeds, reels, instagram Stories, materi kampanye dan publikasi visual lainnya.

Jumlah ini mencerminkan produktivitas tim dalam mendukung kebutuhan komunikasi organisasi secara menyeluruh, baik untuk keperluan internal maupun eksternal.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kinerja komunikasi digital PERADI SAI selama periode pelaporan menunjukkan tren yang positif, baik dari sisi kuantitas produksi konten maupun pertumbuhan audiens. Strategi komunikasi yang berfokus pada konsistensi, relevansi konten, serta pemanfaatan momentum kegiatan terbukti efektif dalam meningkatkan *engagement* dan *exposure* organisasi.

XIX. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG TRANSFORMASI DIGITAL

Selama periode Agustus 2025 – April 2026 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPN PERADI SAI cq. Komite Transformasi Digital dalam rangka implementasi program kerja bidang transformasi digital adalah sebagai berikut:

Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Deskripsi
Pengadaan domain PERADI SAI	9 Oktober 2025	Pembelian domain name baru PERADI SAI yaitu: - peradi-sai.com - peradi-sai.org - peradi-sai.id
Pembuatan *email* PERADI SAI	31 Oktober 2025	Pembuatan *email* baru PERADI SAI dengan menggunakan domain peradi-sai.com untuk beberapa Komite dan Pengurus DPN PERADI SAI.
Formulir Digital DOLC	Januari – Februari 2026	Membuat formulir digital melalui Google Form untuk pengumpulan informasi oleh Komite Advokat Muda pada kegiatan DOLC 2026.
Pembuatan RFP Website dan Database PERADI SAI	Februari 2026 – sekarang	Dokumen *Request For Proposal* (RFP) untuk proyek pembuatan website baru peradi-sai.com dan pembaharuan database Sistem Informasi Advokat (SIA) telah selesai dibuat dan disebarkan kepada 12 calon vendor. Hingga saat ini telah terdapat 3 proposal yang dikirimkan kepada PERADI SAI untuk diseleksi guna ditetapkan sebagai vendor untuk

Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Deskripsi
		pengembangan website dan sistem database PERADI SAI.
Presentasi Vendor	20-24 April 2026	Pemaparan para vendor atas proposal yang telah mereka sampaikan ke PERADI SAI
Negosiasi	27-29 April 2026	
Penentuan Vendor Terpilih	30 April 2026	

Rencana Kegiatan

Untuk selanjutnya, DPN cq. Komite Transformasi Digital akan fokus pada proses **RFP Website dan Database PERADI SAI** dengan rencana kegiatan selanjutnya:

Tahapan	Jadwal
Launching Tahap 1 (*Public Page*)	31 Mei 2026
Launching Tahap 2 (*Member Page*)	30 September 2026

XX. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG DIPLOMASI GLOBAL

Sehubungan pelaksanaan program kerja bidang diplomasi global, DPN PERADI SAI, dimotori oleh Komite Diplomasi Global, telah melaksanakan 3 (tiga) kegiatan selama periode Agustus 2025 – April 2026. Berikut adalah penjelasan terkait pelaksanaan ketiga kegiatan tersebut.

1. Menghadiri The 2025 International Legal Practice Conference di Nanning, Tiongkok, 19 September 2025

Ketua Umum Harry Ponto, Ketua Komite Abadi Tisnadisastra dan Wakil Ketua Komite Triangga Kamal selaku delegasi PERADI SAI menghadiri The 2025 International Legal Practice Conference di Nanning, Tiongkok, 19 September 2025.

PERADI SAI secara resmi menghadiri kegiatan yang mengusung tema '*Cooperating with ASEAN, Shaping the Future Together'*, forum ini menjadi platform penting dalam memperkuat pertukaran serta kerja sama layanan hukum internasional antara Tiongkok dan negara-negara di ASEAN.

Kehadiran delegasi ini merupakan tindak lanjut undangan resmi dari Guangxi Lawyers Association (GXLA) yang bekerja sama dengan Sekretariat China – ASEAN Expo (CAEXPO).





2. **Menerima Kunjungan Singapore International Arbitration Center (SIAC) ke Kantor Sekretariat Nasional PERADI SAI, 30 September 2025**

PERADI SAI diwakili oleh 2 (dua) Wakil Ketua Umum yaitu Nini Halim dan Andi Simangunsong serta Wakil Sekretaris Jenderal, Dewi Savitri menerima kunjungan resmi perwakilan Singapore International Arbitration Center (SIAC). Pertemuan tersebut menghasilkan komitmen awal membangun kerja sama 2 (dua) lembaga yang lebih erat antara lain kerja sama seminar atau webinar untuk kepentingan anggota PERADI SAI.

Kunjungan balasan PERADI SAI ke SIAC dalam waktu dekat akan dilaksanakan untuk mewujudkan kerja sama yang nyata. Untuk itu Komite sedang menyusun model kerja sama yang dimungkinkan oleh kedua lembaga.



3. **Menghadiri Governing Council Meeting Asean Law Association (ALA) ke 46**

Ketua Umum DPN PERADI SAI, Harry Ponto, didampingi Swandy Halim (Wakil Ketua Umum), Dr. Tjia Siauw Jan (Bendahara), Dewi Savitri Reni (Wakil Sekretaris Jenderal), Lydia Wongsonegoro (Wakil Ketua Komite Kemitraaan Strategis) dan Mahareksha Singh Dillon (Wakil Ketua Diplomasi Global) menghadiri Governing Council Meeting Asean Law Association (ALA) ke 46 di Singapura pada tanggal 13 – 14 November 2025.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Ketua Umum DPN PERADI SAI diminta sebagai pembicara dalam seminar berjudul "Transnational Practice of Law in Asean". Kehadiran PERADI SAI sebagai peserta dan sekailigus pembicara dalam kegiatan internasional tersebut membuktikan makin tinggi pengakuan dunia hukum internasional atas eksistensi dan peran PERADI SAI.

4. **PERADI SAI menandatangani Nota Kesepahaman dengan The Law Society of Singapore di Singapura, 9 Maret 2026**

Kerja sama ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara profesi hukum di Indonesia dan Singapura, memfasilitasi pertukaran profesional, dan kerja sama timbal balik. Penandatanganan dokumen nota kesepahaman dilakukan oleh Wakil Presiden The Law Society of Singapore Mr. Dinesh Dhillon dan Ketua Umum PERADI SAI Harry Ponto.



Selain dihadiri oleh Ketua Umum PERADI SAI, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh delegasi PERADI SAI lain, yaitu Abi Abadi Tisnadisastra, Novi Pramita Rahmasari, dan Lavie Daramarezkya.

Nota kesepahaman ini bertujuan untuk mempererat hubungan profesi hukum di Indonesia dan Singapura, dan memfasilitasi pertukaran profesional maupun kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sebelum penandatanganan tersebut, kedua pihak terlebih dahulu melakukan diskusi konstruktir terkait, membahas: (i) peluang kedua pihak untuk melakukan kolaborasi lebih lanjut; (i) pengembangan layanan pro bono; (iii) dampak transformatif AI terhadap keberlangsungan praktek hukum.

XXI. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BIDANG ADVOKAT MUDA

Untuk periode Agustus 2025 – April 2026, DPN PERADI SAI cq. Komite Advokat Muda telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan besar dan bekerja sama/kolaborasi dengan lintas komite yang ada di DPN PERADI dalam rangka pelaksanaan program kerja bidang advokat muda. Dengan kolaborasi bersama komite lainnya diharapkan kegiatan program kerja bidang advokat muda akan terlaksana dengan lebih masif dan lebih sukses.

Berikut adalah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka implementasi program kerja bidang advokat mua

1. Days of Law Career ("DOLC") – BEM FHUI

Waktu Penyelenggaraan	:	29 – 31 Januari 2026
Bentuk Penyelenggaran	:	Booth dalam pameran DOLC
Deskripsi	:	Keikutsertaan PERADI SAI dalam DOLC 2026 merupakan bagian dari komitmen untuk terus hadir mendampingi para Sarjana Hukum dalam mempersiapkan diri menuju profesi Advokat yang berintegritas dan profesional. Kehadiran PERADI SAI di DOLC 2026 menjadi ruang berbagi pandangan dan masukan kepada para Sarjana Hukum yang berniat menjadi Advokat atau para Advokat muda mengenai langkah-langkah persiapan yang tepat untuk menjadi Advokat yang baik dan berkualitas.
Jumlah pengunjung	:	- **324** orang mengisi data dalam bentuk QR - **185** orang mengisi data untuk merchandise - **63** orang mengisi data untuk voucher UPA DPC Jakarta Selatan *(**catatan**: data kasar belum disinkronisasi, ada kemungkinan overlap)*
Mitra Pelaksanaan	:	- DPC PERADI SAI Jakarta Selatan - Komite Pendidikan Profesi Advokat DPN PERADI SAI - Komite Sertifikasi Profesi DPN PERADI SAI

- Komite Magang dan Pengangkatan Advokat DPN PERADI SAI

2. PERADI-SAI After Hours

Waktu Penyelenggaraan	:	23 April 2026
Bentuk Penyelenggaran	:	Sesi informasi Pendidikan S-2 dan S-3 di Amerika Serika oleh Ms. Jabrina Robinson, *Assistant Dean Duke Law School*, Amerika Serikat
Deskripsi	:	Melalui sesi ini, diharapkan para peserta mendapatkan wawasan langsung mengenai perjalanan menempuh gelar LL.M. di Amerika Serikat, mulai dari proses aplikasi, strategi sukses selama studi, hingga peluang karir pasca kelulusan.
Jumlah pengunjung	:	15 *offline*, 30 *online*
Mitra Pelaksanaan	:	AYMP Law Firm

XXII. LAPORAN KESEKRETARIATAN

Dalam rangka mendukung berjalannya roda organisasi PERADI SAI, tim Kesekjenan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal A. Patra M. Zen telah melakukan beberapa inisiatif. Berikut adalah penjelasan detail terkait beberapa inisiatif yang telah dilakukan Kesekratiatan:

- Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja operasional di Seknas PERADI SAI, bekerja sama dengan Komite Transformasi Digital, Kesekjenan dalam waktu dekat akan mengembangkan sistem database PERADI SAI yang menjadi sarana pengelolaan yang terintegrasi atas berbagai data yang dimiliki oleh PERADI SAI, terutama data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PERADI SAI sebagaimana ditetapkan dalam UU Advokat, yaitu data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan PKPA, UPA, magang, pengangkatan dan pengambilan sumpah advokat, registrasi ulang advokat, pengawasan dan penindakan advokat.

- Mmfasilitasi tindak lanjut Rekomendasi MUNAS 2025, rapat koordinasi antar Komite.



- Mengurus pelaksanaan Rapat Pengurus Harian DPN dengan agenda sosialisasi AD PERADI SAI dan pemaparan program kerja per Komite pada 24 Oktober 2025.

- Melakukan sosialisasi AD PERADI SAI kepada Pengurus DPC seluruh Indonesia pada 9 Januari 2026;

- Melakukan koordinasi dengan Komisi III DPR-RI dalam rangka menindaklanjuti undangan Komisi III DPR-RI kepada PERADI SAI untuk menghadiri acara RDP dengan Komisi III DPR-RI yang dilaksanakan pada 24 November 2025 sehubungan dengan rencana pengesahan KUHAP baru;



- Melakukan koordinasi dengan Komisi III DPR-RI dalam rangka menindaklanjuti undangan Komisi III DPR-RI kepada PERADI SAI untuk menghadiri acara RDPU dengan Komisi III DPR-RI pada Senin, 30 Maret 2026 dalam rangka memberikan masukan kepada Komisi III DPR-RI untuk reformulasi RUU Hukum Acara Perdata.





Dalam RDPU tersebut, PERADI SAI menyampaikan bahwa persoalan utama peradilan perdata buka semata soal lamanya proses, tetapi ketiadaan batas yang jelas antar tahapan yang memicu pengulangan tanpa kepastian. PERADI SAI medorong sistem yang lebih ringkas, terstruktur, dan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan, dengan penegasan peran pada dua tingkat peradilan: (i) Pengadilan Negeri sebagai *judex facti* yang menjadi forum final dalam pembuktian nyata; dan (ii) Pengadilan Tinggi sebagai *judex juris* berfokus pada pengujian penerapan hukum, tanpa mengulang pemeriksaan yang sama. Sementara, Mahkamah Agung hanya berperan menjadi ujung tombak terakhir bagi perkara-perkara yang membutuhkan penerapan hukum mendalam melalui terobosan hukum (yurisprudensi) maupun penemuan hukum. Dengan pembagian yang tegas, proses berperkara tidak lagi berputar, melainkan bergerak maju secara efektif dan terarah. Struktur yang jelas akan melahirkan peradilan yang efisien, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum yang nyata bagi para pencari keadilan. Pad akhirnya,

sistem hukum yang baik bukan yang rumit, melainkan yang bekerja secara pasti, sederhana, dan mampu menghadirkan keadilan secara nyata.

- Melakukan koordinasi dengan Komisi III DPR-RI dalam rangka menindaklanjuti undangan Komisi III DPR-RI kepada PERADI SAI untuk menghadiri acara RDPU dengan Komisi III DPR-RI pada 20 April 2026 sehubungan dengan rencana pembahasan RUU Advokat yang baru. Dalam presentasinya, PERADI SAI menyampaikan dinamika profesi Advokat di Indonesia yang semakin menuntut adanya pembaruan. Sejak lahirnya UU Advokat, berbagai tantangan muncul mulai dari lemahnya pengawasan, fragmentasi lebih dari 90 organisasi, hingga implementasi pro bono yang masih sebatas formalitas. Kini, dorongan revisi UU Advokat semakin kuat lewat gagasan yang mengakomodir keberadaan multibar namun dengan syarat hanya ada satu badan pembuat kebijakan, pembentukan Dewan Advokat Nasional, satu kode etik profesi Advokat yang mengikat terhadap seluruh Advokat yang berpraktek di Indonesia, satu Dewan Kehormatan, satu Dewan Pengawas untuk menjaga standar, etika, dan integritas profesi. Yak kalah penting, dalam RDPU tersebut, PERADI SAI juga menyinggung mengenai pentingnya penguatan imunitas Advokat berbasis iktikad baik agar perlindungan hukum terhadap Advokat lebih terjamin. Sebagai penutup, PERADI SAI menyampaikan bahwa pembenahan profesi Advokat bukan hanya soal Advokat, tetapi tentang memastikan akses keadilan yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

  Pada kesempatan ini, Ketua Komisi III Habiburokhman juga menyampaikan bahwa Komisi III berencana untuk membahas RUU Hukum Perdata Internasional dan berniat untuk meminta masukan dari PERADI SAI;

- Selama Agustus 2025 s/d April 2026, memberikan dana santunan kepada 22 keluarga anggota yang meninggal dunia.

XXIII. LAPORAN KEBENDAHARAAN



Mewakili PERADI SAI, pada tanggal 7 November 2025, Bendahara Umum Tjia Siauw Jan bersama dengan Ketua Komorta Jahmada Girsang, Ketua Komite Kemitraan Strategis Ana Sofa yuking dan Wakil Ketua Komite Komunikasi dan Publikasi Novi Pramita Rahmasari menghadiri Undangan Meaningful Participation terkait Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Persyaratan untuk Menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan ("**RPMK Kuasa Wajib Pajak**"), yang disampaikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam forum ini, PERADI SAI merupakan satu-satunya organisasi advokat yang diundang dan aktif berpartisipasi memberi masukan RPMK Kuasa Wajib Pajak tersebut.

Kemudian, salah satu mandat utama organisasi kepada jajaran Bendahara Umum adalah pengadaan/pembelian gedung Seknas. Untuk itulah Ketua Umum mengeluarkan SK DPN PERADI SAI Nomor Kep.009/PERADI SAI/DPN/2025 tertanggal 15 September 2025 ("**SK Pengadaan Gedung Seknas**") dengan susunan panitia:

Ketua: Fenni Yolandani, S.H.

Anggota:

1. Dr. Tjia Siauw Jan, S.E., Ak., M.A., S.H., M.H.
2. Elisabeth S. Silalahi, S.H., LL.M.
3. Zippora BML Siregar, S.H., LL.M.
4. Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M.

Panitia tersebut dibentuk dengan penugasan khusus:

1. merumuskan kriteria gedung yang dibutuhkan;
2. mencari alternatif gedung yang dapat digunakan sebagai Seknas PERADI SAI;
3. mengadakan pendanaan yang dibutuhkan pembelian gedung.

Berikut kami sampaikan pelaksanaan tugas sebagaimana dinyatakan dalam SK Pengadaan Gedung Seknas tersebut:

1. Kriteria Gedung

   Panitia Pengadaan Gedung Seknas, telah menetapkan beberapa kriteria dalam rangka pengadaan gedung Seknas PERADI SAI. Berikut beberapa kriteria yang ditetapkan:

   a. Lokasi Lokasi bangunan harus terletak di daerah yang mudah diakses dan juga mudah dijangkau dengan menggunakan transportasi umum. Lokasi ini penting untuk diperhatikan karena untuk memudahkan mobilitas pengurus DPN PERADI SAI, advokat anggota, serta staf PERADI SAI yang akan beraktivitas/mengurus kepentingannya di Seknas PERADI SAI.

   b. Jenis bangunan Jenis bangunan yang dipilih dapat berupa ruko atau gedung atau unit ruang di dalam suatu gedung.

   c. Legalitas Bangunan/ruang yang akan dibeli oleh PERADI SAI harus memiliki legalitas yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   d. Harga Bangunan/ruang yang akan dibeli oleh PERADI SAI harus dalam batas dana yang dialokasikan oleh PERADI SAI.

   e. Kondisi Bangunan/ruang yang akan dibeli oleh PERADI SAI harus dalam kondisi layak untuk digunakan meskipun kemudian PERADI SAI akan melakukan renovasi atas bangunan/ruang tersebut sehingga memenuhi kebutuhan PERADI SAI.

2. Pencarian Alternatif Gedung

   Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut, panitia telah melakukan pencarian dalam rangka mendapatkan alternatif gedung/ruang yang dapat digunakan sebagai Seknas PERADI SAI. Dengan berbagai pertimbangan dan kriteria yang ditetapkan maka Panitia memilih 2 (dua) ruko beralamat di Jalan Pintu Air V, Pasar Baru, Jakarta Pusat.



3. Pendanaan Gedung

   Menindaklanjuti SK Pengadaan Gedung Seknas, Panitia Pengadaan Gedung Seknas

juga telah menindaklanjuti kegiatan penggalangan dana untuk pengadaan Gedung Seknas yang diadakan pada saat pelantikan pengurus DPN PERADI SAI pada Jum'at, 12 September 2026 di Hotel Sheraton. Perlu kami sampaikan bahwa hingga dibuatnya laporan ini, dana yang terkumpul adalah sebesar Rp3.325.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Bersama ini kami sampaikan juga posisi keuangan PERADI SAI per 31 Desember 2025. Jumlah Aset adalah Rp10.236.479.575,89 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh sembilan rupiah), yaitu terdiri dari Aset Lancar berupa Kas dan Setara Kas PERADI SAI adalah sebesar Rp10.143.769.285,16 (sepuluh miliar seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima koma enam belas rupiah) dan Jumlah Aset Tidak Lancar adalah sebesar Rp92.710.290,73 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh koma tujuh puluh tiga rupiah). Sementara, jumlah Liabilitas PERADI SAI adalah Rp0 (nol rupiah) dan jumlah Ekuitas adalah sebesar Rp10.236.479.575,89 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima koma delapan puluh sembilan rupiah). PERADI SAI juga senantiasa taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab organisasi. Detail mengenai posisi keuangan PERADI SAI per 31 Desember 2025 terlampir dalam Lampiran 2 Laporan ini.

XXIV. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan kerja ini disampaikan untuk menjadi bahan dalam Rapat Kerja Nasional PERADI SAI yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 Mei 2026 di Jakarta.

LAMPIRAN 1
SUSUNAN KEPENGURUSAN PERADI SAI MASA BAKTI 2025 – 2030

DEWAN PEMBINA

JABATAN	NAMA
Ketua	Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H.
Anggota	Dr. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
	Soemarjono Soemarsono, S.H.
	Prof. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H.
	Hasanuddin Nasution, S.H., M.H.

DEWAN PENASIHAT

JABATAN	NAMA
Ketua	Dr. Irwan Hadiwinata, S.H., Sp.N., M.H.
Anggota	Prof. Dr. Todung Mulia Lubis, S.H., LL.M.
	Jhon S.E. Panggabean, S.H., M.H.
	Partahi Sihombing, S.H.
	Dr. Edi Hasibuan, S.H., M.H.
	Wahyuni Bahar, S.H., LL.M.
	Rachland Nashidik, S.H.
	Dr. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

JABATAN	NAMA
Ketua Umum	**Harry Ponto, S.H., LL.M.**
Wakil Ketua Umum	1. Dr. H. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H.
	2. Hj. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc.
	3. Swandy Halim, S.H., M.Sc.
	4. Nini N. Halim, S.H.
	5. Tisje Erlina Yunus, S.H., M.M.

JABATAN	NAMA
	6. Albert Jen Harris Marbun, S.H., M.M.
	7. Andi Fanano Simangunsong, S.H.
	8. Malik Abdullah Bawazier, S.H.
Sekretaris Jenderal	**Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M.**
Wakil Sekretaris Jenderal	1. Dr. Henry M.P. Siahaan, S.H., S.P., M.M.
	2. Hanita Oktavia, S.H.
	3. Francisca Romana N. Alfiani, S.H., M.H.
	4. Samsudin Arwan, S.H., M.H.
	5. Jennifer Berendina Tumbuan, S.H., LL.M.
	6. Dewi Savitri Reni, S.H., LL.M.
	7. Eva Nora, S.H., M.H.
	8. Hadi Herdiansyah, S.H.
	9. Dr. Alfin Sulaiman, S.H., M.H.
	10. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.
	11. Mochamad Sutami Attamimi, S.H.
	12. Dr. Albert Aries, S.H., M.H.
Bendahara Umum	**Dr. Tjia Siauw Jan, S.E., A.K., M.A., S.H., M.H.**
Wakil Bendahara Umum	1. Elizabeth S. Silalahi, S.H., LL.M.
	2. Zippora BML Siregar, S.H., M.H.
	3. Fenni Yolandani, S.H.
	4. Dini Shanti Purwono, S.H., LL.M.
Komite Pendidikan Profesi Advokat	
Ketua	**Dr. N. Pininta Ambuwaru, S.H., M.M., M.H., LL.M.**
Wakil Ketua	1. Diana Prima Penyami, S.H., M.H.
	2. Bosni Gondo Wibowo, S.H., LL.M.
	3. Krismawan Hadiwinata, S.H., M.Kn.
	4. S. Yanti Nurdin, S.H., M.H.
	5. Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H.
	6. Yudhistira W. Atmodjo, S.H., S.E., LL.M.
	7. Dr. Ni Wayan Umi Martina, S.H., M.H.
	8. Ilman Rakhmat, S.H., LL.M.
	9. Indah Dewi Yani, S.H.

JABATAN	NAMA
	10. Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H.
Komite Sertifikasi Profesi	
Ketua	**Patricia Lestari, S.H., M.H.**
Wakil Ketua	1. Benny Ponto, S.H., M.H. 2. Washington Effendi Pangaribuan, S.H., M.H. 3. Pitri Indrianingtyas, S.H., M.H. 4. Dirgayati H. Lase, S.H. 5. Danny Harumansyah Gunawan, S.H., M.H. 6. Saut P. Pangaribuan, S.H.
Komite Magang dan Pengangkatan Advokat	
Ketua	**Tommy Sugih, S.H.**
Wakil Ketua	1. Liston Sibarani, S.H. 2. Edison Panjaitan, S.H. 3. Hendra Sianipar, S.H. 4. Steffen Pieter Tanasale, S.H. 5. Mutiara Tiffany, S.H., M.Hum. 6. Ferry Febry Mewengkang, S.H., M.H. 7. Dr. Hendra Karianga, S.H., M.H. 8. Dr. I Made Arjaya, S.H., M.H.
Komite Organisasi dan Anggota	
Ketua	**Jahmada Girsang, S.H., M.H.**
Wakil Ketua	1. P.S. Jemmy Mokolensang, S.H. 2. Nimran Abdurahman, S.H. 3. Terang Kurnia Girsang, S.H., M.H. 4. Fadjar Marpaung, S.H., M.H. 5. Dr. Daud Barue David L. Batu, S.H., M.H., M.Psi. 6. Leonardo Priko Simanjuntak, S.H., M.H. 7. Fajar Gora, S.H., M.H. 8. Christa Tampubolon, S.H. 9. Beatrix Nidya Pontolaeng, S.H. 10. Magdi Jhon Crony Girsang, S.H., M.H. 11. Dr. Metsie Tatto Kandou, S.H., M.H.

JABATAN	NAMA
	12. Irvan Adwithaman, S.H.
	13. Rio Rama Baskara, S.H., M.H.
Komite Pengembangan Kompetensi	
Ketua	**Mohammad Doddy Kusadrianto, S.H.**
Wakil Ketua	1. Akhmad Henry Setiawan, S.H., M.H.
	2. Harvardy M. Iqbal, S.H., M.H.
	3. Hardiansyah, S.H., M.H.
	4. Dr. Anis Rifai, S.H., M.H.
	5. Raden Widyantara Priambodo, S.H., LL.M.
	6. Dr. Christian Tutojo W., S.H., M.H.
	7. Aufa Imam Muzakki, S.H.
	8. Arief Nugroho, S.H., M.H.
Komite Hukum Investasi dan Ekonomi	
Ketua	**Daniel Ginting, S.H., LL.M.**
Wakil Ketua	1. Santi Achadijati Darmawan, S.H.
	2. Hendrik Silalahi, S.H.
	3. Mohammad Andrew Seftiennovreza, S.H.
	4. Matheus Ramses R., S.H., M.H., M.A.
	5. Nurmalita Malik, S.H., M.H.
	6. Handika Tjen, S.H., LL.M.
	7. Stefy Yully Nataly, S.H., LL.M.
	8. Lewi Aga Basoeki, S.H.
	9. Kurniawan Tanzil, S.H.
	10. M. Hillman Mehaga Sembiring, S.H., M.H.
Komite Kajian dan Isu Strategis	
Ketua	**Dr. Subagyo Sri Utomo, S.H., M.H.**
Wakil Ketua	1. Dr. Timbo Mangaranap Sirait, SH., MH., CTA.
	2. Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H.
	3. Andonius Simanjorang, S.H.
	4. Hanggara M. Radiansyah, S.H.
	5. Donald Hamonangan Siregar, S.H., M.H.
	6. Haris Septiansyah, S.H., LL.M.

JABATAN	NAMA
	7. Aldi Firmansyah, S.H., M.H.
	8. Albert Yulius, S.H.
	9. Robin P. Hutagalung, S.H.
	10. Dr. Agus Sugiarto, S.H., M.H.
Komite Advokasi dan Bantuan Hukum	
Ketua	**Rendy A. Kailimang, S.H., M.H.**
Wakil Ketua	1. Hansye Yunus, S.H.
	2. Ardhiyasa, S.H.
	3. Alfeus Jebabun, S.H., M.H.
	4. Setia Dharma, S.H.
	5. Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., M.H.
	6. Heribertus Nurmanto Bonur, S.H., LL.M.
	7. Genta Manggano, S.H.
	8. Ricky Henrik Tambunan, S.H.
	9. Korsinus Ginto, S.H.
	10. Dedyk Eryanto Nugroho, S.H., M.H., CRA, AIIArb.
	11. Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.
	12. Markus Kurniawan Nababan, S.H., M.H.
	13. Hor Agusmen Girsang, S.H., M.H.
	14. Daniel Pengidoan, S.H., M.H.
	15. Eka Sandra, S.H., M.H.
	16. Adrianus Herman Henok, S.H., M.H.
Komite Kemitraan Strategis	
Ketua	**Ana Sofa Yuking, S.H., M.H.**
Wakil Ketua	1. Dr. Hj. Dhifla Wiyani, S.H., M.H.
	2. Lydia Wongsonegoro, S.H.
	3. Ichsan Perwira Kurniagung, S.H., M.H.
	4. Syamsul Huda Yudha, S.H., M.H.
	5. Lintang Suryaningtyas, S.H., LL.M.
	6. Rossy Fitriati Bendl, S.H., M.H.
	7. Alexander Januar Gaodilliam, S.H.
	8. Dang Perkasa Alam Panjaitan, S.H.
	9. R. Yudha Triarianto Wasono, S.H., M.H.

JABATAN	NAMA
	10. Dr. Renaldi Freyar Hawadi, S.H., M.H.
	11. Lavie Daramarezkya, S.H.
Komite Perlindungan Advokat	
Ketua	**Mohamad Aqil Ali, S.H., M.H.**
Wakil Ketua	1. Dr. Endang Suparta, S.H., M.H.
	2. RR. Diah Kartika, S.H., M.M., C.M., CIRP.
	3. Yohanes Hadi Chandra, S.H., M.H.
	4. Barris Michael Immanuel, S.H., M.H.
	5. Erwin Rommel Sinaga, S.H.
	6. Ngabidin Nurcahyo, S.H.
	7. Riska Elita, S.H., M.H.
	8. Rizky Putra Pratama, S.H., M.H.
	9. Faisal Miza, S.H., M.H.
	10. Victor Parulian Sinaga, S.H., C.N.
	11. Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
	12. Feby Maranta Sukatendel, S.H.
	13. Afrianda Anugra Marsi Gumay, S.H.
	14. Reka Putriyani, S.H., M.H.
Komite Integritas Profesi	
Ketua	**Diarson Lubis, S.H., M.I.P.**
Wakil Ketua	1. Dr. Wahbi Rahman, S.H., M.H.
	2. Fernandy Rusdi, S.H.
	3. Rido Pangaribuan, S.H.
	4. Filipus Arya Sembadastyo, S.H., M.H.
	5. Suwandi, S.H.
	6. Dr. Gusri Putra Dodi, S.H., M.H.
	7. Henock Pandapotan Siahaan, S.H.
	8. Fernando Siagian, S.H.
	9. Berto Herora Harahap, S.H., M.H.
Komite Budaya dan Olahraga	
Ketua	**Andy Natanael Manik, S.H., M.H.**
Wakil Ketua	1. Effendi Syahputra, S.H., M.H.

JABATAN	NAMA
	2. Leonardus Agatha P., S.H., M.H.
	3. Toshinory Alusan Putra Siahaan, S.H., M.H.
	4. Robby Kurnianto, S.H.
	5. Braniko Indhyar, S.H.
	6. Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H., M.H.
	7. Alvin Suryohadiprojo, S.H., LL.M.
	8. Boby Jaya Mustafa, S.H.
	9. Marthin Gogo Rezky, S.H.
	10. Ernesto Aditya N. J. T. Patukaran, S.H.
Komite Kreativitas dan Kebersamaan	
Ketua	**William Eduard Daniel, S.E., S.H., LL.M., MBL**
Wakil Ketua	1. Angel Brigitta Sherafim Rumondor, S.H.
	2. Mayasari Indra, SH., M.H.
	3. Daniel Julio, S.H., M.H.
	4. Joseph Dwi Nabadia, S.H.
	5. Rizki Hendarmin, S.H., M.H.
	6. Abi Rafdi, S.H.
	7. Meily, S.H., M.Hum.
	8. Ivan Silaban, S.H.
	9. Indah Kusumaningrum, S.H.
	10. Muhammad Sahar Ramadhan, S.H.
Komite Tanggung Jawab Sosial	
Ketua	**Hendra Widjaya, S.H., M.Kn.**
Wakil Ketua	1. Sutra Dewi, S.H.
	2. Elisabeth Tania, S.H., M.H.
	3. Putri Safitri Yuninda, S.H.
	4. Iqbal Hendriyasta, S.H.
	5. Christien Natalia, S.H.
	6. Christine Sutjipto, S.H., M.H.
	7. Fally Avriantara, S.H., M.H.
Komite Komunikasi dan Publikasi	
Ketua	**Enrico Iskandar, S.H.**

JABATAN	NAMA
Wakil Ketua	1. Jeihan Hanum, S.H., M.H., M.Kn. 2. Novi Pramita Rahmasari, S.H., M.H. 3. Chandra Melias Manik, S.H., M.H. 4. Rifki Hermawan, S.H., M.H. 5. Mentari Armei Linda, S.H. 6. Yulya Sesarya S., S.H.
Komite Transformasi Digital	
Ketua	**Handoko Taslim, S.H., LL.M.**
Wakil Ketua	1. Raditya Kosasih, S.H., LL.M. 2. Mohammad Doddy Kusadrianto, S.H. 3. Helena Felicea, S.H., LL.M. 4. Halida Nurina, S.H., M.H. 5. Oskar Wirjanata, S.H.
Komite Diplomasi Global	
Ketua	**Abadi Tisnadisastra, S.H., LL.M.**
Wakil Ketua	1. Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M. 2. Dyah Ayu Paramita, S.H., LL.M. 3. Bama Djokonugroho, S.H. 4. Sugianto Osman, S.H., LL.M. 5. Dimas Dwi Rangga, S.H. 6. Teuku Ridzky Amin, S.H., LL.M. 7. Maria Sagrado, S.H. 8. Triangga Kamal, S.H., LL.M. 9. Mahareksha Singh Dillon, S.H., LL.M.
Komite Advokat Muda	
Ketua	**Christian Budianto Teo, S.H., LL.M.**
Wakil Ketua	1. Annes Holantua Sihite, S.H. 2. Patrick Martuah Girsang, S.H. 3. Medita Febriyana Siregar, S.H. 4. Meiliza Dwiandini Sinaga, S.H., LL.M. 5. Johannes Joshua Mulia, S.H., M.H. 6. Anthony Muslim Pattimura, S.H.

JABATAN	NAMA
	7. Adriano Firizky, S.H. 8. Febby Gobel, S.H. 9. Febry Rivisha Anjasmara, S.H., LL.M. 10. David L. P. Simanjuntak, S.H. 11. Arvel Reihan, S.H., LL.M.
Koordinator-Koordinator Daerah	
- Jawa Timur	Dr. H. Syaiful Ma'arif, S.H., C.N., M.H.
- Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimanatan Selatan, dan Kalimantan Utara	Hendrick Juk Abeth S.H., M.H.
- Riau dan Kepulauan Riau	Aziun Asyaari, S.H., M.H.
- Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur	Dr. Abdul Salam, S.H., M.Kn.
- Jawa Barat	A.A. Brata Soedirdja, S.H.
- Maluku dan Maluku Utara	Dr. Adolf Seleky, S.H., M.H.

LAMPIRAN 2
LAPORAN KEUANGAN PERADI SAI PER 31 DESEMBER 2025

PERADI SAI

Neraca (Standar)

Per Tgl. 31 Des 2025

Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi	Nilai ()
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	
Kas & Bank	**10.143.769.285,16**
Bank	**10.133.018.385,16**
Bank BRI IDR a/c 0378-01-001328-307	10.047.969,08
Bank BRI IDR a/c 0378-01-001253-308	47.485.266,92
Bank BCA IDR a/c 206-8656678	7.982.765.857,16
Bank BRI IDR a/c 0426-01-888789-305	2.092.719.292
Kas Kecil	10.750.900
Jumlah Kas dan Setara Kas	**10.143.769.285,16**
Piutang Usaha	
Jumlah Piutang Usaha	**0**
Persediaan	
Jumlah Persediaan	**0**
Aset Lancar Lainnya	
Jumlah Aset Lancar Lainnya	**0**
Jumlah Aset Lancar	**10.143.769.285,16**
ASET TIDAK LANCAR	
Nilai Histori	
Aset Tetap	**138.074.999**
Inventaris Kantor	138.074.999
Jumlah Nilai Histori	**138.074.999**
Akumulasi Penyusutan	
Akumulasi Depresiasi Aset Tetap	**-45.364.708,27**
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	-45.364.708,27
Jumlah Akumulasi Penyusutan	**-45.364.708,27**
Jumlah Aset Tidak Lancar	**92.710.290,73**
Aset Lainnya	
Jumlah Aset Lainnya	**0**
JUMLAH ASET	**10.236.479.575,89**
LIABILITAS DAN EKUITAS	
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha	
Jumlah Utang	**0**

PERADI SAI

Neraca (Standar)

Per Tgl. 31 Des 2025

Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi	Nilai ()
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0
Jumlah Kewajiban	0
EKUITAS	
Modal	10.596.920.501,5
Aktiva Bersih	10.596.920.501,5
Laba Tahun Ini	-360.440.925,61
Jumlah Ekuitas	10.236.479.575,89
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	10.236.479.575,89

PERADI SAI

Laba/Rugi (Standar)

Dari 01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025

Cabang : [Semua Cabang], Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi	1 Jan - 31 Des 2025
PENDAPATAN	
Penerimaan Dana	**6.182.076.470**
Penerimaan Donasi Bencana Alam	102.352.838
Penerimaan Donasi Gedung	1.050.000.000
Penerimaan Donasi Natal	159.876.168
Penerimaan Ujian Profesi Advokat (UPA)	845.700.000
Penerimaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	673.402.500
Penerimaan Iuran Kartu Advokat Magang	54.500.000
Penerimaan Pendaftaran Ulang	34.500.000
Penerimaan Verifikasi Advokat	879.800.777
Penerimaan Penyumpahan Advokat	706.628.000
Penerimaan Rekomendasi Asing	170.000.000
Penerimaan Penyumpahan Advokat DPC Lainnya	476.690.005
Penerimaan Donasi Munas	406.022.707
Penerimaan Donasi Baksos	84.500.025
Penerimaan Donasi Pelantikan	538.103.450
Jumlah Pendapatan	**6.182.076.470**
BEBAN POKOK PENJUALAN	
Jumlah Beban Pokok Penjualan	**0**
LABA KOTOR	**6.182.076.470**
BEBAN OPERASIONAL	
Penggunaan Dana	**6.656.771.223,77**
Beban Karyawan - Gaji	668.376.666
Beban Operasional - DPN Peradi	144.823.817
Beban Operasional - Perjalanan Dinas	52.626.500
Beban Operasional - BPJS	31.735.300
Beban Operasional - Seknas Transportasi	14.081.200
Beban Operasional - Seknas Rapat	8.881.600
Beban Operasional - Perlengkapan & ATK Seknas	32.161.510
Beban Operasional - PDAM Seknas	490.422
Beban Operasional - Listrik Seknas	8.598.722
Beban Operasional - Perlengkapan DPC	6.000.000
Beban Operasional - Dapur Seknas	1.239.255
Beban Operasional - Seknas IPL	5.325.000
Beban Percetakan	97.965.000
Beban Komisi Pendampingan Anggota	12.291.670
Beban Pelantikan Pengurus	479.802.721
Beban Muscab DPC	52.968.250
Beban Komunikasi, Dokumentasi dan Informasi	70.743.868
Beban Perayaan Hari Raya Keagamaan	435.256.800

PERADI SAI

Laba/Rugi (Standar)

Dari 01 Jan 2025 s/d 31 Des 2025

Cabang : [Semua Cabang], Mata Uang : Indonesian Rupiah

Deskripsi	1 Jan - 31 Des 2025
Beban Penyusutan Inventaris Kantor	23.966.770,77
Beban PPh 21	23.578.391
Beban Komisi Penyumpahan Advokat KOMPA	390.586.873
Beban UPA	449.975.004
Beban PKPA	119.535.080
Beban MUNAS	3.095.898.304
Beban Santunan Internal	75.000.000
Beban Internship	5.500.000
Beban Notaris	24.960.000
Beban Donasi	324.402.500
Jumlah Beban Operasional	**6.656.771.223,77**
PENDAPATAN OPERASIONAL	**-474.694.753,77**
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional	
Pendapatan Diluar Usaha	**144.931.036,7**
Pendapatan Jasa Giro	144.931.036,7
Jumlah Pendapatan Non Operasional	**144.931.036,7**
Beban Non Operasional	
Beban Diluar Usaha	**30.677.208,54**
Beban Adm. Bank & Buku Cek/Giro	1.690.000
Pajak Jasa Giro	28.987.208,54
Jumlah Beban Non Operasional	**30.677.208,54**
Jumlah Pendapatan dan Beban Non Operasional	**114.253.828,16**
LABA BERSIH	**-360.440.925,61**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak

Layanan Informasi & Pengaduan: (021) 1500200

informasi@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK (BPE)

Nomor BPE	: **BPE-18935/CT/KPP.0602/2026**
Tanggal	: 10 Maret 2026
NPWP	: 1000000006267353
Nama Wajib Pajak	: ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA
Jenis SPT	: SPT PPh Badan Rupiah
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Januari - Desember 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 10 Maret 2026

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan tanda tangan basah.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 1

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN			STATUS	METODE PEMBUKUAN
	BULAN MULAI	S.D	BULAN AKHIR		
2025	1		12	Normal	Pembukuan Stelsel Akrual

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1.	NPWP	1000000006267353
2.	NAMA	ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA
3.	ALAMAT EMAIL	peradisai1@gmail.com
4.	NOMOR TELEPON	08161960425

B. INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

1	Sektor Usaha Laporan Keuangan pada Lampiran 1	Umum
2	Apakah Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik? (◉ Tidak ○ Ya) Opini Audit:	
	Jika "Ya", isilah informasi mengenai Kantor Akuntan Publik di bawah ini:	
a.	NPWP Kantor Akuntan Publik	
b.	Nama Kantor Akuntan Publik	

C. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1 a	Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final? Jika "Ya", isilah Lampiran 5.	◉ Tidak ○ Ya	
b	Apakah penghasilan Wajib Pajak semata-mata hanya penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final?	◉ Tidak ○ Ya	
2	Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh Final? Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian A.	○ Tidak ◉ Ya	144.931.037
3	Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika "Ya", isilah Lampiran 4 Bagian B.	◉ Tidak ○ Ya	0

D. PERHITUNGAN PPh

4	Penghasilan Neto Fiskal Sebelum Fasilitas Pajak Diisi dari Lampiran 1 (sesuai sektor usaha) Bagian A Kolom (10).		-128.403.863
5	Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal berupa pengurangan penghasilan neto? Jika "Ya", isilah Lampiran 13A.	◉ Tidak ○ Ya	0
6	Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu? Jika "Ya", isilah Lampiran 13B.	◉ Tidak ○ Ya	0
7	Penghasilan Neto Fiskal Setelah Fasilitas Pajak	(4-5-6)	-128.403.863
8	Apakah terdapat kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan? Jika "Ya", isilah Lampiran 7.	◉ Tidak ○ Ya	0
9	Penghasilan Kena Pajak	(7-8)	0
10	Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto untuk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan? Jika "Ya", isilah Lampiran 13B.	◉ Tidak ○ Ya	0
11	Tarif Pajak Jika memilih "Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh, isilah Lampiran 8.		Tarif Fasilitas sebagaimana Pasal 31E ayat (1) UU PPh
12	PPh Terutang	(11x(9-10))	0

E. PENGURANG PPh TERUTANG

13	Apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan/atau dipotong/pungut oleh pihak lain? Jika "Ya", isilah Lampiran 3.	◉ Tidak ○ Ya	0
14	Angsuran PPh Pasal 25		0
15	STP PPh Pasal 25 (Hanya pokok pajak)		0
16	Apakah Wajib Pajak memperoleh Fasilitas Pengurangan PPh Terutang? Jika "Ya", isilah Lampiran 13C.	◉ Tidak ○ Ya	0

F. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

17 a	PPh yang Kurang/Lebih Bayar	(12-13-14-15-16)	0
b	Apakah terdapat Surat Keputusan Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak? Jika "Ya", isilah jumlah pajak yang dapat diangsur/ditunda pembayarannya.	◉ Tidak ○ Ya	0
c	PPh yang masih harus dibayar atau lebih dibayar	(17a-17b)	0
18	Pembetulan (diisi apabila Status SPT adalah Pembetulan)		
	Ganti SPT sebelumnya ☐		
a	PPh yang kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan		0
b	PPh yang kurang atau lebih bayar karena pembetulan	(17a-18a)	-
19 a	Lebih Bayar pada Angka 17 atau 18b mohon untuk: (pilih salah satu)	1. dikembalikan melalui Pemeriksaan 2. dikembalikan melalui Pengembalian Pendahuluan	
b	Informasi Rekening:		
	Nomor Rekening	Nama Bank	
	Nama Pemilik Rekening		

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN (PPh)
WAJIB PAJAK BADAN
DALAM MATA UANG RUPIAH

INDUK
HALAMAN 2

TAHUN PAJAK/ BAGIAN TAHUN PAJAK	PERIODE PEMBUKUAN		STATUS	NPWP
	BULAN MULAI	BULAN AKHIR		
2025	1 S.D	12	Normal	1000000006267353

G. PERHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

20 **Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Angsuran Laporan Penghitungan PPh Pasal 25?** ◉ Tidak ○ Ya — 0
Jika "Tidak", isilah Lampiran 6.
Jika "Ya", pastikan Anda menyampaikan Laporan Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H. PERNYATAAN TRANSAKSI

21	a	**Apakah terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa?** Jika "Ya", isilah Lampiran-10A, 10B, dan 10C.	◉ Tidak ○ Ya
	b	**Apakah Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan Dokumen Penentuan Harga Transfer?** Jika "Ya", isilah Lampiran 10D.	◉ Tidak ○ Ya
	c	**Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi?** Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B.	◉ Tidak ○ Ya
	d	**Apakah Wajib Pajak memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi, dan/atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi?** Jika "Ya", isilah Lampiran 2 Bagian B.	◉ Tidak ○ Ya
	e	**Apakah Wajib Pajak membebankan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal?** Jika "Ya", isilah Lampiran 9.	○ Tidak ◉ Ya
	f	**Apakah Wajib Pajak membebankan biaya entertainment, biaya promosi dan penjualan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih?** Jika "Ya", isilah Lampiran 11A.	◉ Tidak ○ Ya
	g	**Apakah Wajib Pajak memperoleh fasilitas perpajakan dalam rangka penanaman modal selain pengurangan penghasilan neto?** Jika "Ya", isilah Lampiran-13A.	◉ Tidak ○ Ya
	h	**Apakah Wajib Pajak memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana?** Jika "Ya", isilah Lampiran-14.	◉ Tidak ○ Ya
	i	**Apakah Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak?** Jika "Ya", sampaikan Laporan Realisasi Investasi secara terpisah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	◉ Tidak ○ Ya
	j	**Kelebihan PPh Final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembalian** Diisi dari Lampiran 5 (jika terdapat kelebihan PPh, silahkan mengajukan permohonan pengembalian pajak secara terpisah.).	0

I. LAMPIRAN LAINNYA

a	1.	Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit	✓
	2.	Laporan Keuangan Konsolidasi Untuk Entitas Grup	
b		Opini Audit	
c		Laporan Keuangan Konsolidasi untuk Bentuk Usaha Tetap	
d		Bukti Pemotongan sehubungan dengan Kredit Pajak Luar Negeri	
e		Bukti Jenis Penanaman Kembali dan Realisasi Penanaman kembali untuk Bentuk Usaha Tetap	
f		Surat Penghitungan Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar atau Dipotong/Dipungut atas Dividen yang Diterima dari Badan Usaha Luar Negeri (BULN) Nonbursa Terkendali Langsung, termasuk:	
	1)	Laporan Keuangan BULN Nonbursa Terkendali Langsung	
	2)	Fotokopi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan BULN Nonbursa Terkendali Langsung	
	3)	Perhitungan atau Rincian Laba Setelah Pajak dalam 5 (lima) Tahun Terakhir BULN Nonbursa Terkendali Langsung	
	4)	Bukti Pembayaran Pajak Penghasilan atau Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima dari BULN Nonbursa Terkendali Langsung	
g		Bukti Pembayaran Zakat	
h		Laporan Wajib Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka	
	1)	Laporan Bulanan	
	2)	Laporan Kepemilikan Saham yang Memiliki Hubungan Istimewa	
i		Tanda Terima Elektronik Penyampaian Laporan per Negara (Country-by-Country Report)	
j		Dokumen lainnya	

J. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Penandatangan SPT	1	1. Wajib Pajak (Wakil Wajib Pajak)	Tanggal: 10 Maret 2026
		2. Kuasa Wajib Pajak	
NIK/NPWP	3172066801700006		Tanda Tangan
Nama Lengkap	TJIA SIAUW JAN		Ditandatangani secara elektronik
Jabatan	PENGURUS		

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK BADAN

XML Monitoring

Induk L1-A L2 L4 L6 L8 L9 L11-B

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN - UMUM

HEADER

Tahun Pajak: 2025

Nomor Identitas WP: 1000000006267353

A. LAPORAN LABA RUGI

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
	Penjualan								
4002	Penjualan Domestik	0	0	0	0	0	0		0
4003	Penjualan Ekspor				0				0
4004	**Penjualan Bruto**	0			0				0
	Dikurangi :								
4011	Retur				0				0
4012	Potongan Penjualan				0				0
4013	Penyesuaian Penjualan				0				0
4020	**Penjualan Bersih**	0			0				0
	Harga Pokok Penjualan (HPP)								
5001	Pembelian				0				0
5003	Beban Pengangkutan				0				0
5007	Beban Operasional Lainnya				0				0
5008	Persediaan - Awal				0				0
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**	-360.440.926	0	144.931.037	-505.371.963	376.968.100	0		-128.403.863

10:51 AM Returnsheets Portal

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI KOMERSIAL	TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL	OBJEK PAJAK TIDAK FINAL	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	KODE PENYESUAIAN FISKAL	NILAI FISKAL
5009	Dikurangi: Persediaan - Akhir				0				0
5020	**Jumlah HPP**	0			0				0
4300	**Laba Kotor**	0			0				0
4199	Pendapatan Usaha Lainnya	3.841.221.282	0	0	3.841.221.282	0	0		3.841.221.282
	Beban Usaha								
5311	Gaji, Tunjangan, Bonus, Honorarium, THR, dsb	668.376.666			668.376.666	0	0		668.376.666
5312	Beban imbalan kerja lainnya				0				0
5313	Beban Transportasi	66.707.700			66.707.700	0	0		66.707.700
5314	Beban Penyusutan dan Amortisasi	23.966.771			23.966.771	0	0		23.966.771
5315	Beban Sewa				0				0
5316	Beban Bunga				0				0
5317	Beban Sehubungan dengan Jasa				0				0
5318	Beban Penurunan Nilai				0				0
5319	Beban Royalti				0				0
5320	Beban Pemasaran atau Promosi				0				0
5321	Beban Entertainment				0				0
5322	Beban Umum dan Administrasi				0				0
5399	Beban usaha lainnya	5.573.317.587			5.573.317.587	23.578.391	0	FPO-12	5.549.739.196
5400	**Jumlah Beban Usaha**	6.332.368.724			6.332.368.724				6.308.790.333
4500	**Laba (Rugi) Usaha**	-2.491.147.442			-2.491.147.442				-2.467.569.051
	Pendapatan Non Usaha								
4501	Keuntungan Selisih Kurs				0				0
4503	Keuntungan Penjualan Aset selain Persediaan				0				0
4511	Pendapatan Bunga	144.931.037	0	144.931.037	0	0	0		0
4599	Pendapatan Non Usaha Lainnya	2.340.855.188	0	0	2.340.855.188	0	0		2.340.855.188
4600	**Jumlah Pendapatan Non Usaha**	2.485.786.225			2.340.855.188				2.340.855.188
	Beban Non Usaha								
5405	Kerugian Penjualan Aset selain Persediaan				0				0
5409	Sumbangan	324.402.500			324.402.500	324.402.500	0	FPO-12	0
5421	Kerugian Selisih Kurs				0				0
5499	Beban Non Usaha Lainnya	30.677.209			30.677.209	28.987.209	0	FPO-06	1.690.000
5500	**Jumlah Beban Non Usaha**	355.079.709			355.079.709				1.690.000
4700	**Laba (Rugi) Non Usaha**	2.130.706.516			1.985.775.479				2.339.165.188
4800	**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**	-360.440.926	0	144.931.037	-505.371.963	376.968.100	0		-128.403.863

B. LAPORAN POSISI KEUANGAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
	Aset Lancar	
1700	**Jumlah Aset**	Rp. 10.236.479.576

10:51 AM Returnsheets Portal

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
1101	Kas dan Setara Kas	Rp. 10.143.769.289
1122	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	Rp.
1123	Piutang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
1124	Piutang Lainnya - Pihak Ketiga	Rp.
1125	Piutang Lainnya - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
1131	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp.
1181	Aset Kontrak	Rp.
1200	Investasi	Rp.
1401	Persediaan	Rp.
1421	Biaya Dibayar di Muka	Rp.
1423	Pajak Dibayar di Muka	Rp.
1405	Aset yang Dimiliki Untuk Dijual	Rp.
1422	Pendapatan Diterima di Muka	Rp.
1499	Aset lancar lainnya	Rp.
	Aset Tidak Lancar	
1501	Piutang Jangka Panjang	Rp.
1520	Properti Investasi	Rp.
1523	Tanah dan Bangunan	Rp.
1524	Dikurangi : Akumulasi Penyusutan-Tanah dan Bangunan	Rp.
1529	Aset Tetap Lainnya	Rp. 138.074.999
1530	Dikurangi : Akumulasi Penyusutan-Aset Tetap Lainnya	Rp. 45.364.700
1531	Aset Biologis	Rp.
1533	Aset Hak Guna	Rp.
1534	Dikurangi: Akumulasi Penyusutan - Aset Hak Guna	Rp.
1551	Investasi pada Perusahaan Asosiasi, Ventura Bersama dan Anak Perusahaan	Rp.
1599	Investasi Jangka Panjang Lainnya	Rp.
1600	Aset Tak Berwujud	Rp.
1601	Dikurangi : Akumulasi Amortisasi-Aset Tak berwujud	Rp.
1691	Aktiva Pajak Tangguhan	Rp.
1651	Klaim atas pengembalian pajak	Rp.
1658	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Aset Tidak Lancar	Rp.
1696	Aset Tidak Lancar Lainnya	Rp.
1700	**Jumlah Aset**	Rp.

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
	Liabilitas Jangka Pendek	
2102	Utang Usaha - Pihak Ketiga	Rp.
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	Rp. 10.236.479.576

KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI
2103	Utang Usaha - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
2111	Utang Bunga	Rp.
2146	Liabilitas Kontrak	Rp.
2187	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.
2191	Utang Pajak	Rp.
2192	Utang Dividen	Rp.
2195	Beban yang Masih Harus Dibayar	Rp.
2201	Utang Bank Jangka Pendek	Rp.
2202	Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Rp.
2203	Pendapatan Diterima di Muka	Rp.
2228	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	Rp.
	Liabilitas Jangka Panjang	
2301	Utang Bank Jangka Panjang	Rp.
2303	Utang Jangka Panjang-Pihak Ketiga	Rp.
2304	Utang Jangka Panjang - Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Rp.
2312	Liabilitas Sewa Jangka Pendek	Rp.
2322	Liabilitas Imbalan Kerja	Rp.
2321	Liabilitas Pajak Tangguhan	Rp.
2998	Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	Rp.
2999	Jumlah Liabilitas	Rp. 0
	Ekuitas	
3102	Modal Saham	Rp.
3120	Tambahan Modal Disetor	Rp.
3200	Laba Ditahan	Rp. -360.440.926
3297	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Rp.
3298	Ekuitas Lainnya	Rp. 10.596.920.502
3299	Jumlah Ekuitas	Rp. 10.236.479.576
3300	**Jumlah Liabilitas dan Ekuitas**	Rp.